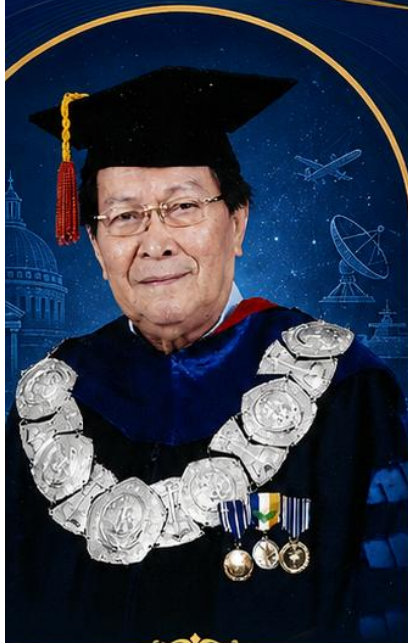


Dari Stabilitas Politik menuju Kemakmuran Ekonomi

Tantangan Indonesia Kontemporer



Oleh:

Prof Rudy C Tarumingkeng, PhD

www.rudycr.com/cv.pdf

IBM - ASMI



1 Makna Utama



Stabilitas politik penting, tetapi harus diubah menjadi pertumbuhan yang inklusif, produktivitas yang meningkat, dan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat.

2 Pilar Stabilitas



- Kepastian hukum
- Institusi yang kuat
- Kepercayaan publik
- Kebijakan yang konsisten
- Keamanan dan ketertiban

3 Jembatan menuju Kemakmuran



- Investasi berkualitas
- Hilirisasi bernilai tambah
- Transformasi digital & AI
- Peningkatan SDM
- Produktivitas dan inovasi

4 Tantangan Indonesia Kontemporer



- Ketimpangan sosial-ekonomi
- Korupsi dan tata kelola
- Ketergantungan komoditas
- Lapangan kerja berkualitas
- Tekanan global dan geopolitik
- Ketahanan pangan dan energi

5 Agenda Strategis



- Memperkuat *rule of law*
- Mendorong industrialisasi cerdas
- Membangun birokrasi efektif
- Memperluas perlindungan sosial
- Memajukan pendidikan dan riset
- Mendorong ekonomi hijau dan berkelanjutan

6 Outcome yang Diharapkan



- Pertumbuhan berkualitas
- Pemerataan kesejahteraan
- Daya saing nasional
- Ketahanan ekonomi
- Indonesia maju dan adaptif



Stabilitas
Politik



Tata
Kelola



Investasi &
Produktivitas



Kemakmuran
Ekonomi



“ Stabilitas bukan tujuan akhir; ia adalah fondasi untuk menghadirkan kemakmuran yang adil, tangguh, dan berkelanjutan. ”



RudyCT Academic Series 2026

Dari Stabilitas Politik menuju Kemakmuran Ekonomi -- Tantangan Indonesia Kontemporer

Oleh:

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD

www.rudyclt.com/cv.pdf

AI - Data analyst, IBM - ASMI

Agustus 2026

Artikel Akademik - Ekonomi Politik, Tata Kelola, dan Transformasi Pembangunan Indonesia

Abstrak

Artikel ini membahas hubungan antara stabilitas politik dan kemakmuran ekonomi dalam konteks Indonesia kontemporer. Argumen utamanya adalah bahwa stabilitas politik merupakan kondisi yang penting, tetapi tidak pernah cukup, bagi kemakmuran. Stabilitas baru mempunyai nilai ekonomi apabila diterjemahkan menjadi kepastian hukum, kredibilitas kebijakan, kualitas birokrasi, kompetisi pasar yang sehat, investasi produktif, penciptaan pekerjaan bermutu, peningkatan produktivitas, perlindungan sosial, dan pemerataan kesempatan. Dengan pendekatan ekonomi politik dan kelembagaan, artikel ini membedakan stabilitas yang bersifat demokratis dan produktif dari stabilitas yang semata-mata administratif atau koersif. Pembahasan menempatkan Indonesia pada persimpangan antara capaian makroekonomi yang relatif tangguh dan tantangan struktural berupa kualitas institusi, produktivitas, informalitas tenaga kerja, ketimpangan wilayah, biaya logistik, kualitas pendidikan, kapasitas inovasi, transisi energi, hilirisasi, ketahanan pangan, serta transformasi digital dan kecerdasan artifisial. Data mutakhir menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II-2026; inflasi Juli 2026 sebesar 2,88 persen; Tingkat Pengangguran Terbuka Februari 2026 sebesar 4,68 persen; dan realisasi investasi semester I-2026 mencapai Rp1.010,6 triliun. Angka tersebut menggambarkan daya tahan, namun tidak dengan sendirinya menjawab pertanyaan mengenai kualitas pertumbuhan dan distribusi manfaatnya. Artikel mengusulkan kerangka “stabilitas berlegitimasi - institusi berkapasitas - transformasi produktif - kemakmuran inklusif” sebagai jalur kebijakan. Pada akhirnya, tantangan utama Indonesia bukan sekadar menjaga ketenangan politik atau mengejar pertumbuhan PDB, melainkan membangun suatu kontrak sosial pembangunan yang membuat stabilitas dipercaya, pertumbuhan dirasakan, dan modernisasi memperluas martabat serta kesempatan warga negara.

Kata Kunci

stabilitas politik; kemakmuran ekonomi; ekonomi politik; institusi; tata kelola; investasi; produktivitas; inklusi; hilirisasi; transformasi digital; Indonesia

Catatan Konteks Data 2026

Data kontemporer yang digunakan dalam artikel ini mengacu pada rilis resmi BPS dan BKPM hingga Agustus 2026. Angka-angka tersebut digunakan sebagai konteks analitis, bukan sebagai satu-satunya ukuran kemakmuran. Penilaian demokrasi dari Freedom House digunakan sebagai salah satu sumber eksternal dan bukan sebagai penilaian tunggal terhadap kualitas demokrasi Indonesia.

Daftar Isi (Ringkas)

1. Pendahuluan: Stabilitas Bukan Garis Akhir
2. Memahami Stabilitas Politik secara Lebih Tepat
3. Dari Stabilitas ke Kemakmuran: Mekanisme Ekonomi Politik
4. Institusi sebagai Jembatan Utama
5. Potret Ekonomi Indonesia 2026: Resilien tetapi Belum Selesai
6. Tantangan Pertama: Kualitas Pertumbuhan dan Produktivitas
7. Tantangan Kedua: Politik Biaya Tinggi, Rente, dan Korupsi
8. Tantangan Ketiga: Kepastian Hukum dan Kredibilitas Kebijakan
9. Tantangan Keempat: Pekerjaan Bermutu dan Kelas Menengah
10. Tantangan Kelima: Ketimpangan Wilayah dan Desentralisasi Produktif
11. Tantangan Keenam: Hilirisasi dari Ekstraksi menuju Kapabilitas
12. Tantangan Ketujuh: Ketahanan Pangan, Energi, dan Iklim
13. Tantangan Kedelapan: Pendidikan, Sains, dan Human Capital
14. Tantangan Kesembilan: Transformasi Digital dan AI
15. Demokrasi, Legitimasi, dan Pertumbuhan
16. Stabilitas Fiskal dan Kualitas Negara
17. BUMN, Swasta, dan Arsitektur Kapitalisme Indonesia
18. Ketahanan Sosial sebagai Fondasi Ekonomi
19. Ekonomi Politik Reformasi: Mengapa Kebijakan Baik Sulit Dilaksanakan
20. Skenario Indonesia 2035: Empat Kemungkinan
21. Kerangka Strategis: Stabilitas Berlegitimasi - Institusi Berkapasitas - Transformasi Produktif - Kemakmuran Inklusif
22. Agenda Kebijakan 2026-2030
23. Implikasi bagi Dunia Usaha dan Kepemimpinan
24. Implikasi bagi Perguruan Tinggi dan Generasi Muda
25. Penutup

Kasus A. Hilirisasi Nikel: Pertumbuhan, Kapabilitas, dan Lingkungan

Kasus B. Digitalisasi Pemerintahan: Dari Administrasi ke Negara Berbasis Data

Kasus C. IKN dan Pembangunan Spasial

Kasus D. UMKM dan AI: Demokratisasi Produktivitas atau Kesenjangan Baru

Kasus E. Stabilitas Harga Pangan dan Legitimasi

Glossarium

Daftar Pustaka

1. Pendahuluan: Stabilitas Bukan Garis Akhir

Dalam wacana pembangunan, stabilitas politik hampir selalu ditempatkan sebagai prasyarat ekonomi. Investor membutuhkan kepastian; rumah tangga membutuhkan rasa aman; pemerintah membutuhkan kapasitas untuk merencanakan dan mengeksekusi kebijakan; dunia usaha membutuhkan aturan yang tidak berubah secara mendadak. Pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa konflik politik yang berkepanjangan, kekerasan, pergantian aturan yang ekstrem, atau kelumpuhan pemerintahan dapat meningkatkan premi risiko, menunda investasi, memperlemah mata uang, mengganggu rantai pasok, dan mengikis kemampuan negara menyediakan layanan publik. Karena itu, stabilitas memang penting.

Namun, hubungan tersebut tidak boleh disederhanakan menjadi rumus “semakin stabil politik, semakin makmur ekonomi.” Sejarah memperlihatkan bahwa stabilitas dapat hidup berdampingan dengan stagnasi, oligarki, rente, rendahnya inovasi, dan ketimpangan. Sebaliknya, demokrasi yang dinamis kadang tampak gaduh tetapi tetap menghasilkan kemajuan ekonomi apabila institusinya mampu menyelesaikan konflik secara damai dan menjaga aturan permainan. Dengan demikian, persoalan analitis bukan sekadar apakah suatu negara stabil, melainkan stabil untuk apa, berdasarkan legitimasi apa, dengan institusi seperti apa, dan bagaimana manfaat pembangunan didistribusikan.

Indonesia memberi laboratorium yang penting untuk pertanyaan itu. Sejak Reformasi 1998, Indonesia mengalami desentralisasi besar, pemilihan umum langsung, pergantian kekuasaan secara damai, perluasan ruang publik, dan pertumbuhan kelas menengah. Pada saat yang sama, negara menghadapi masalah klasik dan baru: korupsi, politik biaya tinggi, ketimpangan wilayah, kualitas regulasi, tekanan urbanisasi, ketergantungan komoditas, kebutuhan penciptaan kerja bermutu, kerentanan iklim, serta revolusi digital yang mengubah cara orang bekerja, berbisnis, dan berpartisipasi secara politik.

Pada 2026, indikator makro memberikan alasan untuk optimisme berhati-hati. Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi triwulan II-2026 sebesar 5,29 persen secara tahunan dan pertumbuhan semester I sebesar 5,45 persen. Inflasi Juli 2026 tercatat 2,88 persen secara tahunan. Tingkat Pengangguran Terbuka Februari 2026 sebesar 4,68 persen, sementara realisasi investasi semester I-2026 mencapai Rp1.010,6 triliun dan dikaitkan dengan penyerapan lebih dari 1,4 juta tenaga kerja langsung. Angka-angka ini menandai resiliensi. Akan tetapi, resiliensi berbeda dari transformasi. Pertumbuhan lima persen dapat menjadi sangat bermakna apabila disertai kenaikan produktivitas, pendapatan riil, kualitas pekerjaan dan layanan publik; tetapi dapat terasa mengecewakan apabila masyarakat menghadapi biaya perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan ketidakpastian kerja yang meningkat.

Karena itu, artikel ini menempatkan stabilitas politik sebagai “modal institusional awal” yang harus dikonversi menjadi kemakmuran melalui serangkaian mekanisme: kepastian hukum, kapasitas negara, kualitas kebijakan, investasi, produktivitas, inovasi, pemerataan kesempatan, dan kepercayaan publik. Konversi inilah yang menentukan apakah stabilitas menghasilkan prosperity dividend atau justru stability trap, yaitu keadaan ketika ketertiban ada tetapi perubahan struktural yang dibutuhkan tertunda.

2. Memahami Stabilitas Politik secara Lebih Tepat

Stabilitas politik dapat dipahami sekurang-kurangnya dalam empat dimensi. Pertama adalah stabilitas pemerintahan, yakni kemampuan eksekutif dan lembaga negara menjalankan fungsi dasar tanpa krisis berkepanjangan. Kedua adalah stabilitas aturan, yaitu konsistensi dan prediktabilitas hukum, regulasi, serta kebijakan. Ketiga adalah stabilitas sosial, yaitu kemampuan masyarakat mengelola perbedaan dan konflik

tanpa kekerasan sistemik. Keempat adalah stabilitas legitimasi, yaitu penerimaan warga bahwa keputusan politik dibuat melalui proses yang dianggap sah, dapat dipertanggungjawabkan, dan menyediakan saluran koreksi.

Dimensi keempat sering diabaikan. Ketertiban yang diperoleh melalui ketakutan atau pembungkaman bisa tampak stabil dalam jangka pendek, tetapi rapuh secara jangka panjang karena akumulasi ketidakpuasan tidak memperoleh kanal institusional. Sebaliknya, demokrasi yang penuh debat dapat memiliki stabilitas legitimasi yang tinggi apabila konflik diselesaikan melalui pemilu, pengadilan, parlemen, media, organisasi masyarakat sipil, dan negosiasi kebijakan.

Bagi ekonomi, bentuk stabilitas yang paling produktif adalah stabilitas yang menurunkan ketidakpastian tanpa membekukan pembaruan. Perusahaan memerlukan aturan yang dapat diprediksi, tetapi juga memerlukan pemerintah yang adaptif ketika teknologi berubah. Masyarakat memerlukan ketertiban, tetapi juga membutuhkan kebebasan untuk menyampaikan kritik, karena kritik berfungsi sebagai mekanisme deteksi kesalahan kebijakan. Dalam terminologi manajemen, negara harus memiliki kombinasi *reliability* dan *adaptability*: dapat diandalkan dalam menegakkan prinsip, tetapi lincah dalam memperbaiki instrumen.

Stabilitas juga perlu dibedakan dari sentralisasi. Pemerintahan yang sangat terpusat mungkin mampu membuat keputusan cepat, tetapi keputusan cepat tidak selalu keputusan baik. Sistem yang lebih tersebar dapat memperlambat proses, namun memungkinkan informasi lokal dan koreksi lebih banyak. Tantangan Indonesia sebagai negara kepulauan dan demokrasi desentralistik adalah membangun koordinasi tanpa menghapus keberagaman dan otonomi yang produktif.

Dengan demikian, indikator stabilitas tidak cukup hanya menghitung demonstrasi, konflik elite, atau pergantian kabinet. Kita juga perlu mengamati konsistensi regulasi, efektivitas pengadilan, integritas proses pengadaan, kualitas pelayanan publik, kebebasan informasi, profesionalisme birokrasi, dan kepercayaan masyarakat. Stabilitas yang sehat adalah kemampuan sistem politik menyerap kejutan, memproses konflik, dan mengembalikan keseimbangan tanpa merusak hak, institusi, serta prospek ekonomi.

3. Dari Stabilitas ke Kemakmuran: Mekanisme Ekonomi Politik

Secara teoretis, stabilitas politik memengaruhi ekonomi melalui beberapa saluran. Saluran pertama adalah risiko. Ketika pelaku ekonomi memperkirakan perubahan kebijakan yang ekstrem, konflik, atau lemahnya penegakan kontrak, mereka meminta tingkat pengembalian lebih tinggi atau menunda investasi. Premi risiko meningkat, biaya modal membesar, dan proyek jangka panjang menjadi kurang menarik. Stabilitas yang kredibel menurunkan ketidakpastian dan memperpanjang horizon perencanaan.

Saluran kedua adalah kapasitas fiskal. Negara yang stabil dan dipercaya lebih mampu menghimpun pajak, menerbitkan surat utang, dan mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta perlindungan sosial. Namun, kapasitas fiskal tidak hanya ditentukan oleh besaran penerimaan. Efisiensi belanja, transparansi, dan kualitas proyek sama pentingnya. Satu rupiah belanja yang mengurangi biaya logistik atau meningkatkan pembelajaran dapat menghasilkan dampak pembangunan yang lebih tinggi dibanding belanja yang rendah produktivitasnya.

Saluran ketiga adalah investasi dan akumulasi modal. Dunia usaha menanamkan modal ketika prospek permintaan dan aturan dianggap masuk akal. Tetapi investasi yang besar tidak identik dengan transformasi struktural. Investasi pada sektor ekstraktif yang minim keterkaitan lokal dapat menghasilkan ekspor tinggi tetapi efek produktivitas terbatas. Karena itu, kualitas investasi perlu dilihat dari transfer teknologi, linkage

dengan pemasok domestik, penciptaan keterampilan, pembentukan klaster, inovasi, dan kontribusi pada transisi industri.

Saluran keempat adalah produktivitas. Kemakmuran jangka panjang bergantung pada seberapa efisien tenaga kerja, modal, teknologi, dan institusi dikombinasikan. Negara yang stabil mempunyai kesempatan membangun infrastruktur dasar dan digital, pendidikan, riset, sistem standardisasi, perlindungan hak kekayaan intelektual, serta kompetisi yang sehat. Inilah ekosistem produktivitas.

Saluran kelima adalah distribusi. Pertumbuhan yang secara agregat kuat tetapi terkonsentrasi pada kelompok atau wilayah tertentu dapat melemahkan legitimasi. Ketika warga melihat jarak yang besar antara statistik makro dan pengalaman rumah tangga, narasi kemajuan kehilangan kredibilitas. Karena itu, kemakmuran harus dibaca melalui pendapatan riil median, mobilitas sosial, akses pekerjaan formal, kualitas layanan publik, ketahanan rumah tangga, dan kesenjangan regional.

Keterkaitan ini bersifat dua arah. Stabilitas mendukung ekonomi, tetapi ekonomi yang inklusif juga mendukung stabilitas. Masyarakat dengan peluang kerja, layanan publik yang layak, dan keyakinan bahwa mobilitas sosial masih mungkin cenderung memiliki insentif lebih besar untuk mempertahankan institusi. Sebaliknya, ketimpangan ekstrem, pengangguran kaum muda, dan rasa tidak adil dapat menjadi sumber ketidakpercayaan politik. Stabilitas dan kemakmuran karena itu membentuk siklus yang dapat bersifat virtuous atau vicious.

4. Institusi sebagai Jembatan Utama

Pemikiran ekonomi kelembagaan menekankan bahwa institusi—aturan formal, norma informal, dan mekanisme penegakan—membentuk insentif. Dua negara dapat memiliki sumber daya alam dan tingkat pendidikan yang mirip tetapi menghasilkan kinerja berbeda karena kualitas institusinya berbeda. Institusi menentukan siapa yang dapat memasuki pasar, bagaimana kontrak ditegakkan, bagaimana konflik diselesaikan, apakah inovator dilindungi, dan apakah kekuasaan ekonomi dapat membeli keistimewaan politik.

Dalam konteks Indonesia, reformasi institusi harus dilihat sebagai agenda ekonomi, bukan semata agenda hukum. Kepastian pertanahan memengaruhi investasi. Kecepatan dan konsistensi perizinan memengaruhi biaya bisnis. Pengadaan publik memengaruhi kualitas infrastruktur. Independensi statistik memengaruhi kualitas keputusan. Integritas regulator memengaruhi kompetisi. Kualitas pemerintah daerah memengaruhi investasi lokal. Ketika institusi bekerja baik, transaksi menjadi lebih murah dan kepercayaan meningkat.

Tantangan muncul karena reformasi institusi sering menghasilkan biaya politik jangka pendek sementara manfaat ekonominya tersebar dan datang lebih lambat. Menutup celah rente, mendigitalisasi pengadaan, memperbaiki perpajakan, atau menegakkan standar lingkungan dapat menghadapi resistensi dari pihak yang kehilangan privilege. Karena itu, reformasi institusi memerlukan koalisi sosial yang memahami bahwa rules-based economy memberi keuntungan lebih besar secara keseluruhan dibanding discretionary economy yang bergantung pada kedekatan.

Institusi yang baik bukan berarti birokrasi tanpa diskresi. Dalam keadaan krisis, pejabat membutuhkan ruang bertindak. Yang diperlukan adalah bounded discretion: ruang keputusan dengan tujuan jelas, data transparan, audit, dan pertanggungjawaban. Sistem yang sepenuhnya mekanis dapat lamban; sistem yang sepenuhnya diskresioner rawan penyalahgunaan.

Indonesia juga perlu memperkuat institusi pembelajaran kebijakan. Kebijakan publik sebaiknya diperlakukan sebagai proses iteratif: merumuskan masalah, merancang intervensi, menguji, mengukur, mengevaluasi, dan memperbaiki. Data administrasi, eksperimen kebijakan, audit kinerja, evaluasi dampak, dan partisipasi publik harus menjadi bagian normal dari pemerintahan. Stabilitas politik yang tidak digunakan untuk membangun learning state merupakan kesempatan yang terbuang.

5. Potret Ekonomi Indonesia 2026: Resilien tetapi Belum Selesai

Pertumbuhan 5,29 persen pada triwulan II-2026 menunjukkan ekonomi Indonesia tetap ekspansif di tengah ketidakpastian global. Struktur ekonomi juga memperlihatkan Jawa masih sangat dominan, dengan kontribusi lebih dari separuh PDB nasional. Dominasi tersebut menandakan kekuatan aglomerasi, tetapi sekaligus mengingatkan bahwa pemerataan spasial belum selesai. Pertumbuhan yang terpusat dapat meningkatkan produktivitas melalui jaringan pemasok dan pasar tenaga kerja, namun juga menciptakan tekanan perumahan, kemacetan, dan disparitas antarwilayah.

Inflasi tahunan Juli 2026 sebesar 2,88 persen secara agregat relatif terjaga. Stabilitas harga penting karena inflasi adalah pajak yang sangat terasa bagi rumah tangga berpendapatan rendah. Namun angka nasional dapat menutupi variasi regional dan komoditas. BPS mencatat perbedaan inflasi antarprovinsi dan kabupaten/kota yang cukup lebar. Karena pola konsumsi rumah tangga miskin lebih terkonsentrasi pada pangan, transportasi, dan kebutuhan dasar, inflasi yang sama dapat menghasilkan beban kesejahteraan yang berbeda.

Pasar tenaga kerja juga menunjukkan kemajuan dengan TPT 4,68 persen pada Februari 2026 dan 147,67 juta penduduk bekerja. Namun angka pengangguran terbuka tidak menggambarkan seluruh persoalan. Indonesia masih memiliki pekerja informal, setengah penganggur, pekerja dengan pendapatan rendah, dan mismatch keterampilan. Rata-rata upah buruh Rp3,29 juta memberi gambaran kasar, tetapi untuk menilai kemakmuran dibutuhkan distribusi upah, upah riil, produktivitas, perlindungan sosial, serta biaya hidup regional.

Realisasi investasi semester I-2026 sebesar Rp1.010,6 triliun dan penyerapan 1.448.862 tenaga kerja menunjukkan kepercayaan investor. Pertanyaan berikutnya adalah komposisi investasi: seberapa besar investasi tersebut masuk ke sektor yang meningkatkan kompleksitas ekonomi? Berapa banyak yang membentuk pemasok lokal? Apakah terjadi peningkatan kemampuan teknis? Apakah investasi memperkuat ekspor bernilai tambah atau hanya memperbesar volume komoditas?

Potret ini menghasilkan kesimpulan penting: Indonesia mempunyai stabilitas makro dan skala pasar yang menjadi aset, tetapi kemakmuran tidak boleh didefinisikan hanya oleh PDB. Negara harus mengubah stabilitas menjadi produktivitas dan produktivitas menjadi kesejahteraan. Itulah inti agenda kontemporer.

6. Tantangan Pertama: Kualitas Pertumbuhan dan Produktivitas

Pertumbuhan ekonomi sering mendapat perhatian terbesar dalam debat publik, tetapi dalam jangka panjang produktivitaslah yang menentukan kenaikan standar hidup. Produktivitas berarti kemampuan menghasilkan nilai lebih besar dari kombinasi input yang tersedia. Produktivitas dapat meningkat melalui teknologi, kualitas manajemen, keterampilan, infrastruktur, skala usaha, inovasi, serta perpindahan tenaga kerja dari aktivitas berproduktivitas rendah ke lebih tinggi.

Indonesia menghadapi tantangan produktivitas di beberapa tingkat. Pada tingkat perusahaan, banyak usaha mikro dan kecil bertahan dalam skala subsisten, memiliki akses terbatas ke pembiayaan, teknologi, pasar, sertifikasi, dan talenta manajerial. Pada tingkat tenaga kerja, kualitas pendidikan dan pelatihan belum selalu sesuai dengan kebutuhan industri. Pada tingkat sistem, biaya logistik, ketidakpastian regulasi, dan kualitas infrastruktur tertentu masih membatasi efisiensi.

Agenda produktivitas karena itu harus lebih luas daripada otomatisasi. Digitalisasi UMKM, misalnya, tidak cukup bila hanya berarti memiliki akun marketplace. Produktivitas digital membutuhkan pencatatan keuangan, manajemen inventori, pembayaran, analitik pelanggan, akses rantai pasok, keamanan siber, dan kemampuan menggunakan AI. Dengan demikian, transformasi digital seharusnya dipandang sebagai upgrading proses bisnis.

Di sektor industri, kebijakan perlu menghindari jebakan “investasi tanpa learning”. Fasilitas produksi dapat dibangun cepat, tetapi kemampuan nasional berkembang ketika perusahaan lokal terlibat sebagai pemasok, insinyur memperoleh pengalaman, universitas terhubung dengan industri, dan standar teknis meningkat. Kemakmuran jangka panjang berasal dari *accumulated capabilities*.

Produktivitas sektor publik juga penting. Bila perizinan yang sebelumnya membutuhkan minggu dapat diselesaikan dalam hari dengan kualitas pengawasan tetap tinggi, produktivitas ekonomi meningkat. Bila data pemerintah interoperabel, bantuan sosial lebih tepat sasaran. Bila pengadaan berbasis data mampu mendeteksi anomali, kebocoran menurun. Reformasi produktivitas karena itu mencakup negara dan pasar sekaligus.

7. Tantangan Kedua: Politik Biaya Tinggi, Rente, dan Korupsi

Kemakmuran ekonomi memerlukan kompetisi yang memungkinkan perusahaan produktif tumbuh. Masalah muncul ketika akses pada izin, proyek, konsesi, kredit, atau perlindungan regulasi lebih banyak ditentukan oleh koneksi daripada efisiensi. Dalam situasi ini, sumber daya berpindah dari kegiatan inovatif ke rent-seeking. Pelaku usaha rasional mengalokasikan energi untuk membangun kedekatan politik karena return dari kedekatan melebihi return dari inovasi.

Politik biaya tinggi memperkuat risiko tersebut. Ketika kontestasi politik membutuhkan pembiayaan sangat besar, muncul insentif untuk membangun hubungan transaksional antara modal dan kekuasaan. Dampaknya tidak selalu terlihat dalam bentuk korupsi sederhana; dapat muncul sebagai desain regulasi yang menguntungkan kelompok tertentu, hambatan masuk, konsesi, atau penegakan yang asimetris.

Korupsi juga memengaruhi kualitas pembangunan. Kebocoran anggaran mengurangi output layanan publik, tetapi dampak yang lebih dalam adalah distorsi pilihan proyek. Infrastruktur dapat dipilih bukan karena social return tertinggi, melainkan karena peluang rente. Akibatnya, negara bisa terlihat aktif membangun, tetapi produktivitas marginal belanja rendah.

Strategi antikorupsi modern harus menggabungkan enforcement dan redesign systems. Penindakan tetap penting, tetapi digitalisasi transaksi, e-procurement, beneficial ownership transparency, analitik jaringan, red-flag analytics, audit berbasis risiko, dan keterbukaan data dapat mengurangi peluang korupsi sebelum terjadi. AI dapat membantu mendeteksi pola anomali, tetapi keputusan penegakan harus tetap tunduk pada due process.

Lebih jauh, kompetisi politik yang sehat juga perlu transparansi pembiayaan, aturan konflik kepentingan, dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Jika stabilitas politik dibangun di atas hubungan patronase yang mahal, biaya akhirnya dapat dibayar oleh perekonomian dalam bentuk efisiensi rendah dan inovasi yang tertahan.

8. Tantangan Ketiga: Kepastian Hukum dan Kredibilitas Kebijakan

Bagi investor, ketidakpastian tidak selalu berarti aturan yang ketat. Perusahaan dapat beradaptasi dengan pajak tinggi atau standar lingkungan tinggi selama aturan jelas, konsisten, dan berlaku setara. Yang paling sulit adalah perubahan mendadak, tumpang tindih kewenangan, interpretasi berbeda antarinstansi, atau penegakan selektif. Karena itu, regulatory quality adalah bagian integral dari daya saing.

Kredibilitas kebijakan dibangun melalui konsistensi antara janji dan tindakan, transparansi rasional kebijakan, konsultasi yang bermakna, dan evaluasi berbasis bukti. Pemerintah tidak harus menjamin bahwa aturan tidak pernah berubah; ekonomi modern justru memerlukan pembaruan. Namun perubahan perlu dapat diprediksi, memiliki masa transisi yang wajar, dan didukung analisis dampak regulasi.

Desentralisasi menambah kompleksitas. Indonesia memiliki variasi kapasitas pemerintah daerah yang besar. Investor dapat menghadapi pengalaman yang sangat berbeda antarwilayah. Solusinya bukan selalu menarik kewenangan ke pusat, melainkan membangun standardisasi minimum, interoperabilitas data, mekanisme koordinasi, dan insentif kinerja daerah.

Kepastian hukum juga harus dirasakan oleh UMKM dan warga, bukan hanya perusahaan besar. Sertifikat tanah, penyelesaian sengketa sederhana, identitas usaha, perlindungan konsumen, dan kontrak digital merupakan infrastruktur hukum bagi ekonomi modern. Negara hukum yang inklusif menurunkan transaction costs bagi jutaan pelaku ekonomi kecil.

Dengan kata lain, kemakmuran memerlukan rule of law yang bekerja sehari-hari. Ia bukan konsep abstrak. Wujud konkretnya adalah apakah kontrak dapat dipercaya, apakah keputusan dapat diprediksi, apakah hak milik aman, apakah masyarakat memperoleh akses keadilan, dan apakah kekuasaan publik dapat diuji secara hukum.

9. Tantangan Keempat: Pekerjaan Bermutu dan Kelas Menengah

Indikator pengangguran yang menurun merupakan berita positif, tetapi kualitas pekerjaan menjadi isu berikutnya. Sebuah ekonomi dapat mencapai pengangguran rendah dengan banyak pekerjaan berupa rendah dan informal. Kemakmuran memerlukan job ladder: jalur yang memungkinkan pekerja meningkatkan produktivitas, keterampilan, upah, perlindungan, dan prospek karier.

Indonesia memiliki populasi muda dan pasar domestik besar. Bonus demografi dapat menjadi motor kemakmuran bila generasi muda masuk ke pekerjaan produktif. Sebaliknya, mismatch antara pendidikan dan pekerjaan dapat menghasilkan underemployment terdidik dan frustrasi sosial. Karena itu, kebijakan pendidikan vokasi, perguruan tinggi, dan pelatihan kerja harus berorientasi pada kompetensi dinamis, bukan hanya sertifikasi.

Kelas menengah memainkan peran politik-ekonomi yang penting. Mereka menjadi basis konsumsi, pembayar pajak, penyedia tenaga terampil, dan penyangga moderasi politik. Tetapi kelas menengah juga rentan terhadap shock biaya hidup, kehilangan pekerjaan, penyakit, dan biaya pendidikan. Ketika mobilitas ke atas

melambat, muncul middle-class anxiety yang dapat mengubah preferensi politik dan kepercayaan pada institusi.

Kebijakan untuk kelas menengah tidak harus berbentuk subsidi universal. Yang lebih penting adalah layanan publik yang dapat dipercaya: transportasi, sekolah, kesehatan, perumahan, internet, keamanan, dan lingkungan. Jika kelas menengah harus membeli seluruh layanan secara privat karena layanan publik tidak memadai, disposable income tertekan walau PDB tumbuh.

Dengan demikian, agenda pekerjaan bermutu mencakup produktivitas perusahaan, perlindungan pekerja, mobilitas keterampilan, child care, transportasi, perumahan, dan kesehatan. Kemakmuran adalah ekosistem yang memungkinkan rumah tangga mengubah pendapatan menjadi keamanan dan peluang.

10. Tantangan Kelima: Ketimpangan Wilayah dan Desentralisasi Produktif

Indonesia adalah negara kepulauan dengan heterogenitas ekonomi yang sangat besar. Aglomerasi di Jawa memberikan keuntungan skala, tetapi konsentrasi tersebut juga menciptakan kesenjangan peluang. Tujuan kebijakan bukan menyebarkan aktivitas secara artifisial hingga kehilangan efisiensi, melainkan memastikan setiap wilayah memiliki konektivitas dan kapabilitas untuk berpartisipasi dalam ekonomi nasional.

Desentralisasi produktif berarti pemerintah daerah tidak hanya berfungsi sebagai administrator transfer pusat, tetapi sebagai platform pembangunan lokal. Pemerintah daerah dapat memperbaiki kemudahan usaha, pendidikan, kesehatan, tata ruang, transportasi, dan pengembangan klaster. Namun kapasitas fiskal dan administratif berbeda-beda, sehingga desain transfer harus memberi insentif pada hasil, bukan hanya serapan anggaran.

Konektivitas fisik tetap penting: pelabuhan, jalan, bandara, listrik, dan logistik dingin. Tetapi konektivitas digital semakin menentukan. Internet yang andal memungkinkan daerah mengakses pendidikan, kesehatan jarak jauh, pasar, jasa profesional, dan administrasi. Karena itu, broadband harus dipandang sebagai infrastruktur ekonomi dasar.

Strategi wilayah juga harus berdasarkan comparative advantage yang dinamis. Daerah yang kaya sumber daya tidak boleh terjebak pada ekspor bahan mentah. Daerah dapat membangun kemampuan pengolahan, jasa logistik, pariwisata berbasis budaya, bioekonomi, energi terbarukan, atau ekonomi kreatif, bergantung pada aset lokal.

Ketimpangan wilayah bukan hanya persoalan keadilan; ia juga persoalan stabilitas. Ketika kelompok atau daerah merasa tertinggal secara persisten, kepercayaan pada proyek nasional dapat melemah. Pembangunan yang lebih seimbang adalah investasi dalam kohesi nasional.

11. Tantangan Keenam: Hilirisasi dari Ekstraksi menuju Kapabilitas

Hilirisasi menjadi salah satu strategi pembangunan Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam. Secara prinsip, strategi ini logis: negara dengan cadangan mineral besar ingin menangkap lebih banyak value chain di dalam negeri. Namun hilirisasi harus dinilai dari kemampuan menghasilkan kapabilitas, bukan hanya dari pembangunan smelter atau kenaikan nilai ekspor.

Pertanyaan kebijakan yang relevan meliputi: berapa banyak tenaga kerja terampil yang terbentuk? Apakah pemasok domestik naik kelas? Apakah teknologi proses dikuasai? Apakah kegiatan riset berkembang?

Apakah industri hilir lanjutan terbentuk? Bagaimana dampak lingkungan dikelola? Bagaimana pendapatan dibagi antara pusat, daerah, masyarakat, pekerja, dan investor?

Hilirisasi yang terlalu bergantung pada insentif tanpa learning requirements berisiko menjadi enclave industry. Fasilitas besar beroperasi, tetapi sebagian besar mesin, teknologi, jasa teknis, dan keputusan bernilai tinggi tetap berasal dari luar. Sebaliknya, hilirisasi yang dirancang sebagai industrial policy dapat membangun supplier development, pendidikan teknik, standardisasi, litbang, dan diversifikasi ekspor.

Kebijakan industri modern juga harus kompatibel dengan transisi energi global. Produk dengan intensitas karbon tinggi dapat menghadapi hambatan pasar. Karena itu, energi bersih, efisiensi proses, traceability, dan standar lingkungan harus menjadi bagian inti hilirisasi. Green industrialization bukan biaya tambahan, melainkan strategi mempertahankan akses pasar masa depan.

Hilirisasi juga memerlukan tata kelola. Karena proyek besar menghasilkan rente besar, transparansi perizinan, beneficial ownership, pengawasan lingkungan, dan mekanisme pembagian manfaat sangat penting. Stabilitas politik yang mendukung hilirisasi harus sekaligus menjamin bahwa transformasi industri tidak mengorbankan legitimasi sosial.

12. Tantangan Ketujuh: Ketahanan Pangan, Energi, dan Iklim

Kemakmuran ekonomi tidak dapat dipisahkan dari ketahanan sistem dasar. Pangan, energi, dan air membentuk fondasi kehidupan sekaligus input produksi. Ketika harga pangan melonjak, daya beli rumah tangga turun. Ketika energi tidak andal, biaya usaha naik. Ketika bencana iklim meningkat, aset dan anggaran publik tertekan.

Indonesia menghadapi paradoks pangan: negara agraris dengan jumlah pekerja besar di pertanian, tetapi produktivitas dan pendapatan banyak petani masih terbatas. Kebijakan pangan tidak cukup mengejar swasembada komoditas tertentu; ia perlu memperkuat produktivitas, irigasi, benih, penyuluhan, logistik, pergudangan, akses pasar, asuransi, dan regenerasi petani.

Energi menghadirkan tantangan transisi. Indonesia memiliki sumber fosil, tetapi juga potensi besar energi terbarukan. Transisi perlu dikelola agar affordable, reliable, dan sustainable. Kebijakan yang terlalu cepat tanpa kesiapan jaringan dapat mengganggu keandalan; terlalu lambat dapat menghasilkan stranded assets dan kehilangan peluang industri hijau.

Perubahan iklim membuat ketahanan menjadi isu makroekonomi. Banjir, kekeringan, kebakaran, kenaikan muka laut, dan cuaca ekstrem memengaruhi produktivitas, kesehatan, pangan, infrastruktur, dan migrasi. Karena itu, climate adaptation harus masuk ke perencanaan pembangunan dan penganggaran.

Stabilitas politik dapat memberikan horizon jangka panjang untuk investasi ketahanan, tetapi keputusan sering terjebak pada siklus pendek. Diperlukan institusi yang mampu menilai risiko lintas dekade. Dalam hal ini, stabilitas yang benar-benar produktif adalah kemampuan politik untuk mempertahankan kebijakan publik yang manfaatnya melampaui masa jabatan.

13. Tantangan Kedelapan: Pendidikan, Sains, dan Human Capital

Tidak ada negara yang mencapai kemakmuran tinggi secara berkelanjutan tanpa human capital. Infrastruktur dapat dibangun relatif cepat, tetapi kemampuan manusia berkembang melalui proses panjang: nutrisi, kesehatan, pendidikan dasar, pendidikan tinggi, pengalaman kerja, dan budaya belajar.

Indonesia perlu menggeser ukuran keberhasilan pendidikan dari enrolment ke learning. Kehadiran di sekolah penting, tetapi kemampuan literasi, numerasi, problem solving, kolaborasi, dan karakter menentukan produktivitas. Pendidikan juga harus mempersiapkan generasi muda untuk dunia kerja yang berubah, di mana AI dan otomatisasi mengambil alih sebagian tugas rutin.

Perguruan tinggi mempunyai peran lebih luas daripada menghasilkan ijazah. Universitas dapat menjadi node inovasi regional, mitra industri, pusat kebijakan, dan pengembang entrepreneurship. Hubungan universitas-industri perlu bergerak dari kegiatan seremonial ke kolaborasi riset, magang bermutu, laboratorium bersama, dan komersialisasi inovasi.

Sains dan litbang memerlukan pendanaan yang konsisten. Inovasi tidak selalu menghasilkan output dalam satu tahun anggaran. Negara yang hanya mendanai proyek jangka pendek sulit membangun frontier capabilities. Stabilitas politik seharusnya digunakan untuk membentuk komitmen jangka panjang pada sains, teknologi, dan talenta.

Namun pendidikan juga merupakan institusi kewargaan. Kemampuan berpikir kritis, memahami data, berdialog, dan menilai informasi sangat penting di era disinformasi. Human capital demokratis dan human capital ekonomi saling menguatkan. Masyarakat yang mampu berpikir kritis lebih mampu mengawasi kekuasaan dan beradaptasi secara produktif.

14. Tantangan Kesembilan: Transformasi Digital dan AI

Transformasi digital menawarkan peluang untuk melompati hambatan lama. Pembayaran digital mengurangi biaya transaksi, layanan pemerintah daring mempercepat administrasi, platform memperluas pasar UMKM, dan analitik data memperbaiki pengambilan keputusan. Gelombang berikutnya adalah AI, yang dapat mengubah produktivitas white-collar maupun blue-collar.

Namun digitalisasi memiliki efek distribusi. Perusahaan besar lebih cepat mengadopsi AI karena memiliki data, modal, dan talenta. UMKM berisiko tertinggal. Pekerja dengan keterampilan komplementer terhadap AI dapat meningkatkan produktivitasnya, sementara pekerja dengan tugas rutin menghadapi tekanan. Tanpa kebijakan reskilling, kesenjangan produktivitas dan upah dapat melebar.

Pemerintah perlu memandang AI sebagai general-purpose technology. Agenda nasional harus mencakup infrastruktur komputasi, data, talenta, riset, adoption support, cybersecurity, serta tata kelola. Penggunaan AI di sektor publik dapat meningkatkan pelayanan, tetapi juga membawa risiko bias, privasi, dan keputusan otomatis yang sulit dipertanggungjawabkan.

Ekonomi digital juga membutuhkan kompetisi. Network effects dapat menghasilkan konsentrasi pasar. Karena itu, kebijakan persaingan perlu memahami data, platform, interoperability, dan switching costs. Tujuannya bukan menghukum skala, melainkan memastikan inovasi tetap terbuka.

Dalam konteks stabilitas politik, AI membawa dimensi baru: disinformasi sintetis, microtargeting, deepfake, dan manipulasi opini. Stabilitas demokratis memerlukan literasi digital, transparansi platform, keamanan

informasi, dan institusi pemilu yang adaptif. Teknologi yang meningkatkan produktivitas juga dapat meningkatkan risiko politik; tata kelola harus mengelola keduanya.

15. Demokrasi, Legitimasi, dan Pertumbuhan

Hubungan demokrasi dan pertumbuhan telah lama diperdebatkan. Beberapa studi menemukan hubungan yang tidak linear, sementara penelitian lebih baru menekankan bahwa demokrasi dapat mendukung pertumbuhan melalui pendidikan, reformasi, akuntabilitas, dan pembatasan kekuasaan. Yang lebih penting bagi Indonesia adalah memahami mekanisme spesifik daripada mencari satu koefisien universal.

Demokrasi menyediakan mekanisme koreksi. Pemilu memungkinkan pergantian pemimpin; parlemen menegosiasikan kepentingan; media dan masyarakat sipil mengungkap masalah; pengadilan menguji keputusan. Semua ini dapat tampak memperlambat kebijakan, tetapi juga mencegah kesalahan besar yang tidak terkoreksi. Dalam teori organisasi, sistem dengan feedback loop kuat lebih adaptif.

Namun demokrasi dapat menghasilkan kebijakan populis jangka pendek apabila institusi lemah. Karena itu, demokrasi memerlukan bureaucracy that can say “how”, independent expertise, transparansi fiskal, dan aturan yang menjaga keberlanjutan. Politik menentukan tujuan dan prioritas; birokrasi profesional membantu memastikan cara pencapaiannya rasional.

Laporan Freedom House 2026 menempatkan Indonesia dalam kategori “Partly Free” dengan skor 56/100, dan mencatat pluralisme serta transfer kekuasaan damai sebagai capaian sekaligus menyoroti tantangan korupsi, diskriminasi, konflik Papua, dan penggunaan hukum tertentu secara politis. Penilaian seperti ini bukan satu-satunya ukuran demokrasi, tetapi relevan sebagai sinyal bahwa stabilitas Indonesia masih memerlukan penguatan kualitas hak, kebebasan, dan akuntabilitas.

Bagi pembangunan, legitimasi adalah aset ekonomi. Kebijakan sulit—reformasi subsidi, pajak, transisi energi, atau perubahan tata ruang—lebih mungkin bertahan bila masyarakat percaya prosesnya adil. Trust mengurangi biaya implementasi. Dengan demikian, demokrasi berkualitas dapat dipandang sebagai infrastructure of trust.

16. Stabilitas Fiskal dan Kualitas Negara

Kemakmuran membutuhkan negara yang mampu membiayai fungsi publik tanpa menciptakan ketidakstabilan makro. Stabilitas fiskal berarti menjaga hubungan yang kredibel antara penerimaan, belanja, defisit, dan utang. Namun disiplin fiskal tidak identik dengan sekadar menekan belanja. Pertanyaan utamanya adalah apakah negara mengalokasikan sumber daya pada investasi sosial dan fisik dengan return tinggi.

Peningkatan tax ratio penting karena kebutuhan pembangunan besar. Tetapi reformasi pajak harus memperhatikan fairness, simplicity, dan administrability. Sistem yang terlalu kompleks meningkatkan biaya kepatuhan dan ruang negosiasi. Digitalisasi administrasi pajak dapat meningkatkan basis data dan kepatuhan, namun harus dibarengi perlindungan data dan mekanisme keberatan yang efektif.

Dari sisi belanja, tantangan terbesar adalah outcome. Serapan anggaran bukan ukuran keberhasilan final. Program pendidikan harus dinilai dari learning outcomes; kesehatan dari kualitas dan akses; infrastruktur dari pengurangan waktu dan biaya; bantuan sosial dari penurunan kerentanan. Performance budgeting seharusnya menghubungkan rupiah dengan hasil.

Stabilitas fiskal juga membutuhkan pengelolaan risiko kontinjensi: BUMN, proyek kerja sama, bencana, pensiun, dan perubahan iklim. Risiko yang tidak terlihat dalam defisit tahunan dapat muncul sebagai kewajiban besar di masa depan. Karena itu, transparansi neraca publik penting.

Negara yang kuat secara fiskal bukan negara yang selalu besar, melainkan negara yang mampu memobilisasi sumber daya secara legitimate dan menggunakannya secara efektif. Kualitas negara adalah kombinasi capacity, integrity, dan accountability.

17. BUMN, Swasta, dan Arsitektur Kapitalisme Indonesia

Indonesia memiliki model ekonomi campuran di mana BUMN memainkan peran penting di sektor strategis sementara swasta menjadi motor utama banyak kegiatan produksi dan jasa. Pertanyaan kebijakan bukan memilih negara atau pasar secara ideologis, tetapi merancang pembagian peran yang memaksimalkan nilai publik.

BUMN dapat menjalankan fungsi strategis ketika pasar gagal, kebutuhan infrastruktur besar, atau proyek memiliki externalities tinggi. Namun BUMN juga menghadapi risiko soft budget constraints, intervensi politik, dan crowding out. Karena itu, governance, transparansi, profesionalisme dewan, serta pemisahan fungsi regulator dan operator menjadi penting.

Swasta membutuhkan kompetisi yang sehat. Jika pasar terkonsentrasi dan entry barriers tinggi, profit dapat berasal dari market power bukan produktivitas. Kebijakan persaingan harus mampu menilai merger, praktek eksklusif, platform digital, dan hubungan vertikal dalam rantai pasok.

Kemitraan publik-swasta dapat mempercepat pembangunan, tetapi kontrak harus membagi risiko secara rasional. Pemerintah tidak seharusnya memprivatisasi keuntungan dan menasionalisasi kerugian. Value for money, transparansi kontrak, dan kemampuan negosiasi pemerintah penting.

Arsitektur kapitalisme Indonesia yang sehat adalah yang menggabungkan entrepreneurship dengan social purpose: keuntungan diperoleh melalui inovasi dan efisiensi, bukan privilege. Stabilitas politik mempunyai nilai jika membantu menciptakan arena kompetisi yang fair.

18. Ketahanan Sosial sebagai Fondasi Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi selalu menghasilkan perubahan. Sektor tumbuh dan menyusut, teknologi menggantikan tugas, kota berkembang, dan keterampilan lama kehilangan nilai. Tanpa perlindungan sosial, masyarakat dapat menolak perubahan bukan karena anti-modernisasi, tetapi karena menanggung risiko secara sepihak.

Social protection karena itu bukan lawan efisiensi. Sistem yang menyediakan jaring pengaman, layanan kesehatan, pelatihan ulang, dan dukungan transisi dapat membuat ekonomi lebih berani melakukan reformasi. Flexicurity—fleksibilitas ekonomi yang disertai keamanan sosial—menjadi konsep relevan.

Indonesia telah membangun berbagai program bantuan dan jaminan sosial. Tantangan berikutnya adalah integrasi data, ketepatan sasaran, portability, dan respons terhadap shock. Basis data sosial-ekonomi yang semakin terpadu dapat membantu, tetapi kualitas data dan mekanisme grievance harus diperkuat.

Ketahanan sosial juga mencakup perumahan dan kota. Urbanisasi tanpa perumahan terjangkau dapat membuat pekerja tinggal jauh dari tempat kerja, meningkatkan biaya transportasi dan menurunkan

produktivitas. Demikian pula, layanan child care yang terbatas dapat mengurangi partisipasi kerja perempuan.

Kemakmuran pada akhirnya dirasakan di tingkat rumah tangga. Stabilitas politik menjadi bermakna ketika keluarga memiliki keyakinan bahwa mereka dapat merencanakan masa depan, membiayai pendidikan, mengakses kesehatan, memperoleh pekerjaan, dan pulih dari shock.

19. Ekonomi Politik Reformasi: Mengapa Kebijakan Baik Sulit Dilaksanakan

Banyak reformasi ekonomi telah diketahui secara teknis, tetapi implementasinya sulit karena distribusi biaya dan manfaat. Kelompok yang dirugikan sering terkonsentrasi, terorganisasi, dan memiliki insentif kuat untuk menolak; penerima manfaat tersebar dan manfaatnya datang kemudian. Inilah political economy of reform.

Contohnya, pengurangan distorsi subsidi dapat meningkatkan efisiensi fiskal, tetapi masyarakat langsung merasakan kenaikan harga. Reformasi perizinan dapat mengurangi rente birokrasi, tetapi mengancam kepentingan tertentu. Penegakan lingkungan dapat meningkatkan keberlanjutan, tetapi menambah biaya jangka pendek bagi industri. Karena itu, desain transisi dan kompensasi sangat penting.

Reformasi juga memerlukan sequencing. Tidak semua perubahan dapat dilakukan sekaligus. Pemerintah perlu memilih bottleneck yang jika diatasi membuka reformasi lain. Misalnya, perbaikan identitas dan data dapat meningkatkan pajak, bantuan sosial, dan pelayanan sekaligus.

Komunikasi publik merupakan bagian dari kebijakan, bukan kosmetik. Pemerintah perlu menjelaskan masalah, alternatif, trade-off, dan siapa yang menerima manfaat. Masyarakat lebih mungkin menerima kebijakan sulit jika alasan dapat diuji dan distribusi beban dianggap fair.

Stabilitas politik dapat memberi ruang untuk reformasi, tetapi juga dapat menciptakan complacency. Ketika tekanan politik rendah, elite mungkin menunda perubahan. Karena itu, stabilitas harus dipasangkan dengan urgency yang dibangun dari visi jangka panjang, benchmarking internasional, dan indikator kinerja yang transparan.

20. Skenario Indonesia 2035: Empat Kemungkinan

Untuk memahami hubungan stabilitas dan kemakmuran, berguna menggunakan scenario planning. Skenario bukan ramalan; ia adalah alat untuk menguji strategi terhadap beberapa masa depan yang mungkin.

Skenario pertama, “Stabilitas Transformatif”, terjadi bila stabilitas politik disertai reformasi institusi, produktivitas, investasi berkualitas, pendidikan, dan transisi digital-hijau. Indonesia naik kelas dalam kompleksitas ekonomi, memperluas pekerjaan formal, dan memperkuat kelas menengah. Trust meningkat karena masyarakat merasakan mobilitas.

Skenario kedua, “Stabilitas Stagnan”, terjadi bila ketertiban terjaga tetapi reformasi struktural lamban. Pertumbuhan bertahan sekitar tren, investasi masuk terutama ke sektor berbasis sumber daya, produktivitas naik lambat, dan pekerjaan bermutu tidak tumbuh cukup cepat. Statistik makro terlihat sehat, tetapi aspirasi generasi muda melampaui peluang.

Skenario ketiga, “Pertumbuhan Rapuh”, terjadi bila ekonomi tumbuh melalui boom komoditas atau kredit tetapi institusi tidak kuat. Ketika shock eksternal datang, modal keluar, fiskal tertekan, dan konflik distribusi meningkat. Stabilitas politik ikut melemah.

Skenario keempat, “Fragmentasi dan Ketidakpercayaan”, terjadi bila ketimpangan, disinformasi, konflik identitas, dan penurunan kualitas institusi saling memperkuat. Investasi jangka panjang tertahan dan kebijakan menjadi reaktif.

Kebijakan yang robust adalah kebijakan yang memperbesar probabilitas skenario pertama dan tetap bermanfaat pada skenario lain: pendidikan, rule of law, data berkualitas, kesehatan, infrastruktur adaptif, diversifikasi ekonomi, dan kepercayaan publik. Ini adalah no-regret investments.

21. Kerangka Strategis: Stabilitas Berlegitimasi - Institusi Berkapasitas - Transformasi Produktif - Kemakmuran Inklusif

Artikel ini mengusulkan empat lapis kerangka strategis. Lapisan pertama adalah stabilitas berlegitimasi. Tujuannya menjaga ketertiban melalui proses yang sah, transparan, dan dapat dikoreksi. Indikatornya bukan hanya tidak adanya konflik, tetapi kepercayaan pada institusi, akses keadilan, kualitas pemilu, kebebasan informasi, dan penyelesaian sengketa.

Lapisan kedua adalah institusi berkapasitas. Negara harus mampu merancang dan melaksanakan kebijakan. Ini mencakup birokrasi profesional, data interoperabel, procurement yang bersih, sistem fiskal, koordinasi pusat-daerah, regulator kompeten, dan evaluasi kebijakan.

Lapisan ketiga adalah transformasi produktif. Stabilitas dan institusi harus diarahkan pada peningkatan produktivitas melalui investasi berkualitas, industrial upgrading, digitalisasi, AI, pendidikan, riset, konektivitas, dan transisi energi. Transformasi harus mendorong perusahaan dan pekerja naik kelas.

Lapisan keempat adalah kemakmuran inklusif. Output akhir diukur dari kesejahteraan rumah tangga, pekerjaan bermutu, mobilitas sosial, penurunan kemiskinan, pemerataan regional, kualitas layanan, kesehatan lingkungan, dan ketahanan terhadap shock.

Keempat lapisan bersifat berurutan sekaligus saling umpan balik. Kemakmuran inklusif memperkuat legitimasi, sementara legitimasi meningkatkan kemampuan negara melakukan reformasi. Bila salah satu lapisan rapuh, sistem terganggu. Stabilitas tanpa kapasitas menghasilkan stagnasi; kapasitas tanpa legitimasi menghasilkan resistensi; transformasi tanpa inklusi menghasilkan backlash; inklusi tanpa produktivitas sulit dibiayai.

22. Agenda Kebijakan 2026-2030

Pertama, memperkuat rule of law dan kualitas regulasi. Pemerintah perlu memperluas regulatory impact assessment, harmonisasi pusat-daerah, simplifikasi proses, transparansi perubahan aturan, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat. Kepastian harus dibangun melalui proses, bukan privilege.

Kedua, menjadikan produktivitas nasional sebagai agenda lintas kementerian. Dibutuhkan scoreboard produktivitas yang mencakup logistik, keterampilan, adopsi teknologi, kualitas manajemen, investasi, riset, dan produktivitas sektor publik. Pertumbuhan PDB harus dipasangkan dengan indikator output per pekerja dan total factor productivity.

Ketiga, mempercepat penciptaan pekerjaan bermutu. Fokus pada industri dan jasa tradable, manufaktur berteknologi menengah, ekonomi hijau, kesehatan, logistik, pariwisata berkualitas, ekonomi kreatif, dan layanan digital. Program pelatihan harus terhubung dengan demand nyata dari perusahaan.

Keempat, mengubah hilirisasi menjadi capability policy. Insentif investasi perlu terkait supplier development, transfer teknologi, pelatihan, litbang, energi bersih, dan standarisasi. Daerah penghasil perlu memperoleh manfaat melalui pekerjaan, pendapatan, infrastruktur, dan lingkungan yang lebih baik.

Kelima, memperkuat human capital sejak usia dini hingga lifelong learning. Nutrisi, kualitas guru, pembelajaran dasar, pendidikan vokasi adaptif, universitas riset, dan reskilling orang dewasa harus menjadi satu continuum.

Keenam, membangun digital public infrastructure yang aman dan interoperabel. Identitas, pembayaran, pertukaran data, layanan pemerintah, dan cybersecurity dapat mengurangi biaya transaksi. AI sektor publik harus tunduk pada audit, transparansi, dan perlindungan hak.

Ketujuh, memperkuat ketahanan iklim, pangan, dan energi. Semua proyek besar perlu climate-risk screening. Sistem pangan perlu lebih efisien dan petani lebih produktif. Transisi energi perlu dipercepat sambil menjaga keterjangkauan dan keandalan.

Kedelapan, memperbaiki kualitas demokrasi ekonomi: transparansi pembiayaan politik, konflik kepentingan, kompetisi usaha, beneficial ownership, pengadaan, dan keterbukaan data. Tujuannya memastikan bahwa pertumbuhan berasal dari entrepreneurship, bukan rente.

Kesembilan, memperkuat kontrak sosial melalui layanan publik. Masyarakat menilai negara dari pengalaman sehari-hari: sekolah, rumah sakit, transportasi, keamanan, administrasi, dan lingkungan. Layanan yang berkualitas membentuk trust.

Kesepuluh, membangun kultur evaluasi. Program harus memiliki teori perubahan, baseline, indikator, evaluasi independen, dan mekanisme penghentian bila tidak efektif. Stabilitas politik memberikan kesempatan untuk berorientasi jangka panjang; kultur evaluasi memastikan kesempatan itu digunakan secara disiplin.

23. Implikasi bagi Dunia Usaha dan Kepemimpinan

Dunia usaha bukan penonton dalam hubungan stabilitas dan kemakmuran. Perusahaan memengaruhi kualitas institusi melalui cara mereka berinteraksi dengan pemerintah, pekerja, pemasok, dan masyarakat. Perusahaan yang bergantung pada rente mungkin memperoleh keuntungan jangka pendek, tetapi ikut membangun ekosistem yang tidak kompetitif dan rapuh.

Pemimpin bisnis perlu mengembangkan political-risk intelligence yang lebih luas. Risiko politik bukan hanya kemungkinan kerusuhan, tetapi perubahan regulasi, legitimasi sosial, konflik lingkungan, geopolitik, privasi data, dan backlash terhadap otomatisasi. Board perlu memasukkan isu ini ke enterprise risk management.

Investasi pada human capital juga menjadi strategi bisnis. Di era AI, perusahaan yang hanya memotong biaya tenaga kerja melalui otomatisasi dapat kehilangan kemampuan organisasi. Model yang lebih berkelanjutan adalah augmentation: menggabungkan manusia dan mesin untuk meningkatkan output, kualitas, dan inovasi.

Perusahaan juga perlu membangun trust melalui tata kelola ESG yang substantif. Environmental dan social responsibility bukan sekadar laporan; ia memengaruhi license to operate. Governance yang baik mengurangi risiko fraud dan meningkatkan akses modal.

Bagi pemimpin publik, pesan utamanya serupa: kepemimpinan kontemporer harus menyatukan legitimacy, competence, dan adaptability. Pemimpin yang hanya populer tanpa kapasitas sulit menghasilkan

transformasi; pemimpin yang kompeten tanpa legitimasi sulit mempertahankan reformasi; pemimpin yang stabil tetapi tidak adaptif dapat tertinggal oleh perubahan.

24. Implikasi bagi Perguruan Tinggi dan Generasi Muda

Perguruan tinggi perlu mengajarkan ekonomi politik sebagai interaksi antara manajemen, institusi, teknologi, dan masyarakat. Mahasiswa manajemen tidak cukup memahami strategi perusahaan tanpa memahami kebijakan publik, geopolitik, AI, perubahan iklim, dan governance.

Generasi muda akan memasuki dunia kerja yang lebih volatil. Mereka membutuhkan kombinasi analytical thinking, digital literacy, AI fluency, komunikasi, kreativitas, ethical judgment, dan kemampuan belajar. Di saat yang sama, mereka perlu memahami bahwa kemakmuran nasional bukan produk otomatis dari teknologi. Institusi menentukan siapa memperoleh manfaat.

Kampus dapat berfungsi sebagai ruang dialog yang menjaga stabilitas demokratis. Perbedaan pendapat perlu diproses secara argumentatif, berdasarkan data, bukan permusuhan identitas. Tradisi akademik mengajarkan bahwa kritik merupakan mekanisme perbaikan.

Bagi penelitian, agenda yang luas terbuka: hubungan kualitas pemerintah daerah dengan investasi; dampak digital public services terhadap biaya usaha; pengaruh AI terhadap produktivitas UMKM; middle-class vulnerability; quality of jobs; dampak hilirisasi pada supplier lokal; dan hubungan trust dengan kepatuhan pajak.

Pendidikan tinggi seharusnya mempersiapkan mahasiswa bukan hanya menjadi job seekers, tetapi institution builders. Indonesia membutuhkan generasi profesional yang mampu memperbaiki organisasi, membuat sistem lebih transparan, dan menghubungkan inovasi dengan kepentingan publik.

25. Penutup

Perjalanan dari stabilitas politik menuju kemakmuran ekonomi bukan garis lurus. Stabilitas adalah kondisi yang memberi ruang bagi pembangunan, tetapi ruang tersebut harus diisi oleh institusi yang kredibel, kebijakan yang berkualitas, investasi produktif, pendidikan, inovasi, dan distribusi kesempatan yang adil.

Indonesia pada 2026 memiliki aset besar: skala pasar, demografi, sumber daya alam, posisi geografis strategis, pengalaman demokrasi, infrastruktur yang berkembang, dan ekonomi digital yang dinamis. Data pertumbuhan, inflasi, ketenagakerjaan, dan investasi menunjukkan resiliensi. Tantangannya adalah meningkatkan kualitas transformasi sehingga angka makro diterjemahkan menjadi pengalaman hidup yang lebih baik.

Jika stabilitas hanya diukur dari ketenangan politik, negara dapat puas terlalu cepat. Stabilitas yang benar-benar bernilai adalah stabilitas yang memungkinkan institusi belajar, warga mengkritik, bisnis berkompetisi, inovator bereksperimen, pekerja naik kelas, dan daerah berkembang sesuai potensinya. Ia adalah stabilitas yang memiliki legitimacy dan adaptability.

Kemakmuran juga perlu didefinisikan secara luas. PDB penting, tetapi kemakmuran mencakup pendapatan riil, keamanan ekonomi, kualitas pekerjaan, kesehatan, pendidikan, lingkungan, waktu, mobilitas sosial, dan keyakinan bahwa generasi berikutnya memiliki kesempatan lebih baik. Kemakmuran adalah kemampuan manusia menjalani kehidupan yang bernilai.

Karena itu, agenda Indonesia kontemporer dapat diringkas dalam satu transformasi: dari politics of stability menuju politics of capability. Pemerintah, dunia usaha, kampus, dan masyarakat sipil perlu membangun kemampuan kolektif untuk menyelesaikan masalah. Ketika stabilitas menghasilkan kapasitas, kapasitas menghasilkan produktivitas, dan produktivitas dibagikan melalui institusi yang adil, kemakmuran menjadi lebih dari slogan. Ia menjadi kontrak sosial yang dapat dirasakan.

26. Pendalaman: Stabilitas Demokratis versus Stabilitas Administratif

Perbedaan antara stabilitas demokratis dan stabilitas administratif sangat penting bagi analisis pembangunan. Stabilitas administratif mengacu pada kemampuan pemerintah menjaga kontinuitas keputusan, mengendalikan birokrasi, dan mencegah disrupsi terhadap fungsi negara. Stabilitas demokratis lebih luas: ia meliputi kemampuan sistem politik mengelola pergantian kekuasaan, konflik kepentingan, kritik, oposisi, dan perubahan sosial melalui institusi yang dipercaya. Sebuah negara dapat mempunyai stabilitas administratif yang kuat tetapi stabilitas demokratis yang lemah apabila proses pengambilan keputusan kurang terbuka, kanal koreksi menyempit, dan akuntabilitas menurun. Sebaliknya, negara demokratis dapat mengalami debat politik intens, tetapi tetap stabil jika aturan dasar diterima semua pihak.

Dari perspektif ekonomi, stabilitas administratif memang memberi manfaat langsung. Proyek dapat berjalan, kebijakan dapat dieksekusi, dan koordinasi lebih mudah. Namun manfaat tersebut mempunyai batas. Ekonomi modern membutuhkan informasi yang tersebar di masyarakat dan pasar. Ketika kritik dianggap ancaman, informasi buruk cenderung tidak naik ke pengambil keputusan. Dalam organisasi, hal ini dikenal sebagai problem of silence: bawahan menyembunyikan masalah agar tidak dianggap tidak loyal. Pada level negara, problem yang sama dapat menghasilkan policy blind spots. Karena itu, kebebasan akademik, media yang profesional, lembaga audit, masyarakat sipil, dan oposisi yang konstruktif mempunyai fungsi ekonomi sebagai sistem peringatan dini.

Stabilitas demokratis juga memperluas legitimasi reformasi. Sebagian kebijakan pembangunan menimbulkan trade-off nyata. Reformasi pajak, perubahan subsidi, penataan ruang, transisi energi, dan konsolidasi fiskal menghasilkan pihak yang menang dan kalah dalam jangka pendek. Jika keputusan dibuat melalui proses yang transparan dan dapat diperdebatkan, masyarakat lebih mungkin menerima biaya transisi. Sebaliknya, bahkan kebijakan yang secara teknis rasional dapat menghadapi penolakan apabila proses dianggap tidak adil.

Indonesia pasca-Reformasi telah membangun mekanisme elektoral dan desentralisasi yang luas. Tantangan berikutnya adalah meningkatkan kualitas demokrasi substantif: keterbukaan informasi, kualitas deliberasi, transparansi pembiayaan politik, rule of law, independensi institusi pengawasan, dan profesionalisme birokrasi. Kualitas ini tidak selalu menghasilkan pertumbuhan seketika, tetapi membentuk kemampuan jangka panjang untuk mengoreksi kesalahan.

Di sinilah konsep adaptive stability relevan. Stabilitas bukan keadaan tanpa perubahan, melainkan kemampuan berubah tanpa runtuh. Sistem politik yang sehat harus mampu menyerap protes, pemilu, pergantian pejabat, shock ekonomi, dan perubahan teknologi tanpa kehilangan fungsi inti. Dalam ilmu ekologi, sistem resilien tidak identik dengan sistem statis; ia dapat beradaptasi sambil mempertahankan identitas. Hal yang sama berlaku bagi negara.

Bagi Indonesia, sasaran strategis bukan mengurangi dinamika politik sampai seminimal mungkin, melainkan meningkatkan kualitas mekanisme yang mengubah dinamika tersebut menjadi keputusan. Debat publik yang

berbasis data, konsultasi yang sungguh-sungguh, judicial review, audit, dan evaluasi kebijakan adalah mekanisme konversi konflik menjadi pembelajaran. Dengan demikian, stabilitas demokratis merupakan aset produktif karena menggabungkan predictability dan feedback.

Pada tingkat bisnis, investor jangka panjang biasanya lebih menghargai institusi daripada personalisasi kekuasaan. Mereka ingin mengetahui bahwa kontrak tetap berlaku setelah pejabat berganti, bahwa sengketa dapat diselesaikan melalui hukum, dan bahwa regulasi tidak bergantung pada hubungan pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas yang berbasis aturan lebih bernilai daripada stabilitas yang berbasis figur.

Karena itu, bila Indonesia ingin mengubah stabilitas politik menjadi kemakmuran, perhatian harus bergeser dari sekadar kontinuitas pemerintahan ke kontinuitas institusi. Pemerintah datang dan pergi, tetapi kapasitas negara, kualitas data, profesionalisme birokrasi, independensi hukum, dan norma akuntabilitas harus semakin kuat. Itulah fondasi stabilitas yang kompatibel dengan modernisasi.

27. Pendalaman: Kepercayaan Publik sebagai Modal Ekonomi

Kepercayaan publik sering dianggap konsep sosial yang abstrak, padahal ia memiliki konsekuensi ekonomi yang konkret. Ketika warga mempercayai institusi, mereka lebih bersedia membayar pajak, mematuhi regulasi, menggunakan layanan publik, menerima kebijakan sulit, dan melakukan transaksi dengan biaya pengawasan lebih rendah. Ketika trust rendah, setiap kebijakan menghadapi biaya verifikasi, litigasi, pengawasan, dan komunikasi yang lebih besar.

Dalam ekonomi, kepercayaan dapat dilihat sebagai pengurang transaction costs. Bisnis yang percaya pada penegakan kontrak tidak perlu mengeluarkan biaya berlebihan untuk perlindungan informal. Warga yang percaya bahwa pajak digunakan dengan benar lebih mungkin patuh. Investor yang percaya data pemerintah lebih mudah membuat keputusan. Karena itu, trust bukan substitusi bagi institusi; trust justru tumbuh dari institusi yang konsisten dan kompeten.

Indonesia menghadapi tantangan khas masyarakat digital. Informasi beredar sangat cepat, tetapi kualitasnya tidak seragam. Kesalahan kecil dapat menjadi viral, sementara penjelasan teknis yang panjang sulit mendapat perhatian. Dalam lingkungan ini, pemerintah tidak cukup mengandalkan komunikasi satu arah. Diperlukan evidence communication: membuka data, menjelaskan metode, mengakui ketidakpastian, dan memperbaiki kesalahan secara terbuka.

Kepercayaan juga berhubungan dengan fairness. Masyarakat menilai kebijakan bukan hanya dari hasil, tetapi dari apakah proses dianggap adil. Jika aturan ditegakkan secara berbeda terhadap kelompok kuat dan lemah, kepercayaan menurun. Jika bantuan sosial dianggap dipolitisasi, legitimasi program berkurang. Jika tender publik tidak transparan, masyarakat menganggap pembangunan sebagai arena distribusi rente.

Dalam jangka panjang, trust memengaruhi appetite for reform. Negara dengan tingkat kepercayaan lebih tinggi mempunyai ruang kebijakan lebih luas karena masyarakat percaya bahwa pengorbanan sementara mungkin menghasilkan manfaat kolektif. Negara dengan trust rendah terjebak dalam populisme: setiap perubahan yang menimbulkan biaya segera ditolak karena masyarakat tidak yakin manfaat akan dibagikan secara adil.

Membangun trust memerlukan empat kualitas. Pertama, competence: pemerintah mampu memberikan hasil. Kedua, integrity: keputusan tidak dibajak kepentingan pribadi. Ketiga, reliability: aturan konsisten. Keempat, openness: informasi tersedia dan kritik dapat disampaikan. Keempatnya saling melengkapi.

Dunia usaha juga berkepentingan pada trust. Perusahaan yang mengabaikan lingkungan, pekerja, atau konsumen dapat menghadapi social backlash. Corporate legitimacy menjadi bagian dari risk management. Karena itu, tata kelola ESG yang nyata dapat dipandang sebagai investasi dalam social capital.

Bagi Indonesia, indikator kepercayaan seharusnya menjadi bagian dari dashboard pembangunan. Survei persepsi warga, kepuasan layanan, kepercayaan terhadap institusi, dan pengalaman korupsi dapat melengkapi indikator makro. Pemerintah perlu mengetahui bukan hanya apakah ekonomi tumbuh, tetapi apakah warga percaya bahwa sistem bekerja untuk mereka.

Pada akhirnya, stabilitas yang paling tahan lama adalah stabilitas yang bersumber dari kepercayaan, bukan ketakutan. Trust menghasilkan voluntary compliance; ketakutan menghasilkan compliance yang mahal dan rapuh. Dalam ekonomi modern yang kompleks, negara tidak mungkin mengawasi setiap transaksi. Ia membutuhkan cooperation by consent. Karena itu, kepercayaan publik adalah salah satu bentuk modal ekonomi paling penting tetapi sering tidak terlihat dalam neraca nasional.

28. Pendalaman: Kualitas Pekerjaan, Upah Riil, dan Produktivitas Rumah Tangga

Ketika tingkat pengangguran turun, perhatian kebijakan perlu bergerak ke kualitas pekerjaan. Konsep pekerjaan bermutu mencakup sekurang-kurangnya pendapatan yang memadai, kepastian yang wajar, keselamatan kerja, perlindungan sosial, peluang belajar, dan prospek mobilitas. Di negara berkembang, seseorang dapat dikategorikan bekerja namun tetap miskin atau rentan. Karena itu, employment quantity dan employment quality harus dibaca bersama.

Rata-rata upah buruh pada Februari 2026 sebesar Rp3,29 juta memberikan titik referensi, tetapi rata-rata tidak menunjukkan distribusi. Perbedaan antarwilayah, pendidikan, gender, sektor, dan status pekerjaan dapat besar. Selain itu, nominal wage harus dibandingkan dengan biaya hidup. Upah yang naik tiga persen sementara biaya perumahan dan pendidikan naik lebih tinggi dapat menurunkan kesejahteraan subjektif.

Produktivitas rumah tangga juga dipengaruhi oleh infrastruktur sosial. Waktu perjalanan yang panjang mengurangi waktu keluarga dan belajar. Ketiadaan child care membatasi partisipasi kerja perempuan. Layanan kesehatan yang tidak mudah diakses meningkatkan risiko kehilangan pendapatan. Karena itu, kebijakan transportasi, kota, kesehatan, dan perumahan mempunyai efek tenaga kerja.

Perubahan teknologi menambah dimensi baru. AI tidak hanya menghilangkan pekerjaan; ia memecah pekerjaan menjadi tasks. Sebagian tugas dapat diotomatisasi, sementara tugas lain menjadi lebih produktif dengan AI. Kebijakan ketenagakerjaan perlu bergeser dari pendekatan occupation-based ke task-based. Pekerja perlu mengetahui keterampilan mana yang menjadi komplementer terhadap mesin: judgement, komunikasi, problem solving, kreativitas, dan domain expertise.

Reskilling juga perlu dirancang sebagai sistem, bukan program sesaat. Kredensial mikro, recognition of prior learning, apprenticeship, pelatihan industri, dan akun belajar individual dapat memberi fleksibilitas. Perusahaan perlu mendapat insentif untuk melatih pekerja, terutama ketika manfaat pelatihan dapat dinikmati perusahaan lain setelah pekerja pindah.

Kualitas pekerjaan juga berkaitan dengan formalitas. Formalisasi tidak boleh hanya berarti kewajiban tambahan; ia harus memberi manfaat nyata berupa akses pembiayaan, perlindungan sosial, kontrak, dan

pasar. Jika biaya formal tinggi dan manfaat rendah, pelaku ekonomi tetap informal. Reformasi harus mengubah benefit-cost ratio formalization.

Kelas menengah baru sering tumbuh dari pekerjaan formal yang produktif. Karena itu, job creation merupakan kebijakan kelas menengah. Ekonomi yang terlalu banyak menghasilkan pekerjaan berproduktivitas rendah akan sulit memperluas basis pajak dan konsumsi. Sebaliknya, pekerjaan bermutu memperkuat fiscal capacity karena lebih banyak warga memiliki pendapatan stabil.

Stabilitas politik berperan dengan menyediakan horizon bagi investasi tenaga kerja. Perusahaan bersedia melatih karyawan bila mereka percaya bisnis akan bertahan. Rumah tangga berinvestasi dalam pendidikan bila percaya keterampilan akan dihargai. Namun stabilitas harus disertai pertumbuhan sektor produktif. Jika struktur ekonomi tidak bergerak, supply of skills dapat melebihi demand, menghasilkan educated underemployment.

Dengan demikian, indikator pembangunan ketenagakerjaan perlu diperluas: median wage, real wage growth, formal employment, underemployment, job tenure, training participation, labor productivity, female labor force participation, dan occupational mobility. Kemakmuran tidak hanya berarti banyak orang bekerja, tetapi semakin banyak orang bekerja pada aktivitas yang memungkinkan mereka hidup lebih baik dan berkembang.

29. Pendalaman: Kelas Menengah sebagai Penyangga Stabilitas dan Mesin Permintaan

Kelas menengah mempunyai posisi strategis dalam pembangunan karena menghubungkan ekonomi, fiskal, dan politik. Secara ekonomi, kelas menengah menciptakan permintaan terhadap barang dan jasa yang lebih beragam—pendidikan, kesehatan, perumahan, transportasi, rekreasi, teknologi, dan jasa profesional. Permintaan tersebut mendorong diversifikasi bisnis dan penciptaan pekerjaan. Secara fiskal, kelas menengah merupakan basis pajak potensial. Secara politik, mereka cenderung menuntut layanan publik, transparansi, dan kepastian hukum.

Namun kelas menengah bukan kelompok yang homogen atau selalu aman. Banyak rumah tangga berada sedikit di atas garis kerentanan. Shock kesehatan, kehilangan pekerjaan, kenaikan cicilan, atau biaya pendidikan dapat mendorong mereka turun kelas. Karena itu, ukuran kelas menengah sebaiknya mempertimbangkan economic security, bukan hanya level konsumsi sesaat.

Dalam ekonomi perkotaan, tekanan perumahan menjadi salah satu sumber kerentanan. Harga tanah dan rumah dapat naik lebih cepat dari pendapatan, memaksa pekerja tinggal jauh dari pusat pekerjaan. Commute panjang menghasilkan biaya ekonomi dan sosial. Kebijakan perumahan terjangkau, transportasi massal, dan tata ruang dapat secara langsung meningkatkan disposable income dan kualitas hidup.

Pendidikan anak merupakan pengeluaran besar lain. Ketika keluarga tidak mempercayai kualitas sekolah publik, mereka membeli pendidikan privat, bimbingan, dan berbagai kursus. Hal yang sama berlaku untuk kesehatan. Akibatnya, beban ganda muncul: kelas menengah membayar pajak sekaligus membeli layanan privat. Jika pengalaman ini persisten, willingness to pay taxes dapat menurun.

Kelas menengah juga sangat sensitif terhadap persepsi fairness. Mereka sering menerima bahwa ketimpangan ada selama mobilitas sosial terbuka. Masalah muncul ketika keberhasilan tampak ditentukan oleh koneksi, warisan, atau privilege. Maka ketimpangan opportunity lebih berbahaya daripada sekadar ketimpangan outcome.

Digitalisasi membawa peluang dan tekanan. Kelas profesional dapat memperoleh produktivitas lebih tinggi dengan AI, tetapi juga menghadapi risiko otomatisasi fungsi rutin. Mereka perlu terus belajar. Kebijakan lifelong learning menjadi bagian dari perlindungan kelas menengah.

Dari perspektif politik, kelas menengah dapat menjadi penyangga moderasi bila mereka memiliki stake in the system. Namun middle-class anxiety dapat meningkatkan polarisasi jika aspirasi naik lebih cepat daripada peluang. Karena itu, strategi kemakmuran harus menjaga expectation-opportunity balance.

Indonesia perlu mengembangkan agenda kelas menengah yang tidak semata subsidi. Fokusnya adalah affordable public goods: pendidikan berkualitas, kesehatan, transportasi, perumahan, internet, keamanan, udara bersih, dan administrasi sederhana. Dengan layanan publik yang baik, pendapatan rumah tangga dapat digunakan untuk menabung, investasi, dan kewirausahaan.

Pada akhirnya, perluasan kelas menengah merupakan indikator bahwa stabilitas dan pertumbuhan telah menghasilkan mobilitas. Bila ekonomi tumbuh tetapi kelas menengah menyusut atau merasa semakin rentan, ada sesuatu yang perlu diperbaiki pada mekanisme distribusi manfaat pembangunan.

30. Pendalaman: Pertumbuhan, Ketimpangan, dan Mobilitas Sosial

Debat pembangunan sering mempertentangkan pertumbuhan dan pemerataan seolah keduanya selalu trade-off. Dalam kenyataan, hubungan lebih kompleks. Pada tahap tertentu, ketimpangan dapat muncul karena sektor baru tumbuh lebih cepat daripada sektor lama. Namun ketimpangan yang terlalu tinggi dapat mengurangi mobilitas sosial, melemahkan permintaan domestik, memengaruhi politik, dan menghambat investasi human capital kelompok miskin.

Pertanyaan yang paling produktif bukan apakah semua pendapatan harus sama, melainkan apakah kesempatan untuk maju cukup terbuka. Equality of opportunity mencakup akses terhadap nutrisi, pendidikan, kesehatan, jaringan transportasi, internet, pembiayaan, dan perlakuan hukum. Anak yang lahir di keluarga miskin tidak seharusnya terperangkap karena kualitas sekolah atau kesehatan yang jauh lebih buruk.

Mobilitas sosial juga memiliki dimensi wilayah. Anak di kota besar mendapat akses sekolah, internet, mentor, dan pasar kerja yang lebih kaya dibanding daerah terpencil. Digitalisasi dapat mengurangi gap, tetapi hanya jika infrastruktur dan kualitas konten tersedia.

Ketimpangan aset perlu mendapat perhatian. Kepemilikan tanah, rumah, saham, dan bisnis menghasilkan keuntungan kapital yang dapat tumbuh lebih cepat dari upah. Jika sebagian besar masyarakat tidak memiliki aset produktif, mereka hanya bergantung pada labor income. Kebijakan perumahan, tabungan, pensiun, dan financial inclusion dapat membantu memperluas asset ownership.

Dalam ekonomi politik, ketimpangan ekstrem dapat menyebabkan policy capture. Kelompok sangat kaya memiliki kemampuan lebih besar memengaruhi regulasi, media, dan politik. Hal ini menciptakan feedback loop: kekayaan menghasilkan pengaruh, pengaruh menghasilkan kebijakan yang mempertahankan kekayaan. Institusi demokrasi dan kompetisi ekonomi berfungsi memutus loop tersebut.

Namun redistribusi yang buruk juga dapat merusak produktivitas. Kebijakan perlu membedakan redistribution of opportunity dan redistribution of income. Investasi pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kompetisi sering memberi efek ganda: lebih adil sekaligus lebih produktif. Transfer tunai tetap diperlukan untuk kemiskinan dan shock, tetapi tidak menggantikan pembangunan kapabilitas.

Kemakmuran inklusif berarti pertumbuhan yang menciptakan tangga mobilitas. Masyarakat menerima perbedaan pendapatan lebih mudah ketika percaya tangga tersebut dapat dinaiki. Jika tangga rusak, ketimpangan menjadi sumber frustrasi.

Karena itu, dashboard pembangunan perlu mencakup intergenerational mobility, learning gaps, akses perguruan tinggi, home ownership, formal credit, dan kualitas pekerjaan menurut kelompok pendapatan. PDB per kapita tidak cukup menunjukkan apakah kesempatan semakin terbuka.

Stabilitas politik yang tahan lama memerlukan rasa fairness. Fairness bukan berarti setiap orang memperoleh hasil yang sama, tetapi bahwa aturan tidak dimanipulasi dan kesempatan dasar tersedia. Dengan demikian, kebijakan pemerataan sebenarnya juga merupakan kebijakan stabilitas jangka panjang.

31. Pendalaman: Pusat-Daerah dan Desain Desentralisasi Generasi Kedua

Desentralisasi Indonesia merupakan salah satu transformasi institusional terbesar pasca-Reformasi. Ia mendekatkan pengambilan keputusan ke masyarakat dan membuka ruang inovasi lokal. Namun setelah lebih dari dua dekade, tantangan bergeser dari membangun otonomi ke meningkatkan kualitas otonomi. Ini dapat disebut desentralisasi generasi kedua.

Pada generasi pertama, fokus utama adalah pembagian kewenangan dan transfer fiskal. Pada generasi kedua, fokus harus bergeser ke kapasitas, kinerja, dan akuntabilitas. Daerah perlu mampu merancang layanan berdasarkan data, mengembangkan ekonomi lokal, dan mengelola investasi. Pemerintah pusat perlu menetapkan standar minimum, menyediakan data dan platform, serta memberi insentif berdasarkan hasil.

Perbedaan kapasitas daerah sangat besar. Kota besar dapat memiliki staf teknis dan basis pajak yang kuat, sementara kabupaten terpencil bergantung pada transfer. Kebijakan one-size-fits-all tidak efektif. Pendampingan, shared services, dan regional cooperation dapat membantu daerah kecil memperoleh skala.

Kompetisi antarwilayah juga perlu diarahkan secara sehat. Daerah dapat berlomba menarik investasi melalui perbaikan layanan dan infrastruktur, bukan melalui pemberian privilege yang merusak pajak atau lingkungan. Benchmarking terbuka terhadap waktu perizinan, kualitas sekolah, layanan kesehatan, dan investasi dapat menciptakan reputational incentives.

Konektivitas antardaerah menjadi kunci karena ekonomi tidak mengikuti batas administrasi. Kawasan metropolitan mencakup beberapa pemerintah daerah. Tanpa koordinasi, transportasi, banjir, sampah, dan perumahan sulit diselesaikan. Dibutuhkan metropolitan governance dan mekanisme pembiayaan bersama.

Desentralisasi juga relevan bagi stabilitas politik. Ia memungkinkan aspirasi lokal mendapat ruang dan mengurangi rasa bahwa semua keputusan dibuat di pusat. Namun desentralisasi dapat menciptakan elite capture lokal bila transparansi lemah. Karena itu, media lokal, DPRD, partisipasi warga, dan audit penting.

Data publik dapat memperkuat akuntabilitas daerah. Dashboard layanan yang mudah dipahami memungkinkan warga membandingkan kinerja. Misalnya, bukan hanya berapa banyak anggaran pendidikan, tetapi berapa learning improvement. Bukan hanya panjang jalan dibangun, tetapi penurunan waktu tempuh.

Indonesia juga dapat mengembangkan place-based industrial policy. Pemerintah pusat menentukan arah nasional, sedangkan daerah mengidentifikasi klaster yang sesuai: agroindustri, marine economy, tourism, renewable energy, digital services, atau manufacturing. Universitas lokal dapat menjadi knowledge partner.

Desentralisasi generasi kedua pada akhirnya bertujuan mengubah daerah dari spending units menjadi development institutions. Ketika kapasitas lokal meningkat, pertumbuhan menjadi lebih tersebar dan stabilitas nasional semakin kuat karena manfaat pembangunan terasa lebih dekat.

32. Pendalaman: Industrial Policy Modern dan Risiko Salah Arah

Kebijakan industri kembali mendapat perhatian di banyak negara karena geopolitik, transisi energi, dan persaingan teknologi. Indonesia juga aktif melalui hilirisasi, kawasan industri, insentif investasi, dan dukungan sektor strategis. Pertanyaan bukan lagi apakah industrial policy boleh dilakukan, tetapi bagaimana melakukannya secara disiplin.

Industrial policy modern berbeda dari proteksi permanen. Tujuannya mengatasi coordination failures, learning externalities, dan kebutuhan investasi awal yang besar. Pemerintah dapat membantu membangun infrastruktur, keterampilan, standardisasi, dan riset. Namun dukungan harus bersyarat pada performance, bukan diberikan tanpa evaluasi.

Risiko pertama adalah picking losers. Pemerintah tidak selalu memiliki informasi untuk memilih sektor masa depan. Karena itu, kebijakan sebaiknya berorientasi pada capabilities yang dapat digunakan lintas sektor: engineering, digitalization, logistics, clean energy, testing labs, quality standards, dan vocational skills.

Risiko kedua adalah capture. Perusahaan dapat mempertahankan subsidi meski tidak produktif. Sunset clauses dan periodic review penting. Dukungan harus dapat dihentikan jika target ekspor, produktivitas, atau transfer teknologi tidak tercapai.

Risiko ketiga adalah proteksi pasar domestik yang mengurangi kompetisi. Infant industry argument hanya valid bila industri benar-benar belajar. Tanpa competitive pressure, perusahaan dapat nyaman dengan margin tinggi. Karena itu, exposure to export markets sering menjadi mekanisme disiplin.

Risiko keempat adalah konflik dengan sustainability. Industri yang dibangun hari ini dapat kehilangan pasar bila intensitas karbon terlalu tinggi. Green standards perlu dimasukkan sejak desain awal.

Indonesia memiliki keunggulan dalam sumber daya dan pasar besar, tetapi perlu meningkatkan complexity. Fokus dapat diarahkan pada ekosistem baterai dan kendaraan listrik, agro-processing canggih, bioeconomy, electronics, medical devices, marine industry, dan digital services. Namun sektor harus dipilih berdasarkan evidence dan kemampuan membangun linkage.

Universitas dan lembaga riset harus terhubung. Industrial upgrading terjadi ketika pengetahuan bergerak antara perusahaan, pemasok, universitas, dan pekerja. Kawasan industri seharusnya menjadi learning ecosystems, bukan hanya kumpulan pabrik.

Stabilitas kebijakan memberi keuntungan besar bagi industrial policy karena proyek learning membutuhkan waktu. Tetapi stabilitas harus disertai evaluasi. Konsistensi tujuan tidak berarti mempertahankan instrumen yang gagal. Negara perlu stable in direction, adaptive in tools.

Dengan disiplin tersebut, kebijakan industri dapat menjadi jembatan antara stabilitas politik dan kemakmuran: stabilitas menurunkan risiko investasi, kebijakan membangun kemampuan, kemampuan meningkatkan produktivitas, dan produktivitas menciptakan upah serta basis pajak yang lebih tinggi.

33. Pendalaman: Transisi Energi sebagai Ujian Politik Kemakmuran

Transisi energi sering diperlakukan sebagai isu teknis, padahal ia adalah isu ekonomi politik yang sangat besar. Sistem energi menyentuh harga listrik, transportasi, industri, penerimaan negara, investasi, pekerjaan, dan distribusi geografis. Perubahan dari fosil menuju energi rendah karbon menciptakan pemenang dan pihak yang harus beradaptasi.

Indonesia memiliki tantangan ganda: memenuhi kebutuhan energi yang terus naik sekaligus menurunkan emisi. Energi harus tersedia, terjangkau, dan berkelanjutan. Jika salah satu unsur diabaikan, legitimasi transisi dapat terganggu.

Batubara masih terkait dengan pembangkit, industri, pekerjaan, dan ekonomi daerah. Pengurangan bertahap memerlukan just transition. Daerah yang bergantung pada batubara membutuhkan diversifikasi ekonomi, pelatihan pekerja, dan sumber pendapatan alternatif. Jika biaya transisi hanya ditanggung komunitas tertentu, resistensi meningkat.

Di sisi lain, energi terbarukan menawarkan peluang industri. Solar, geothermal, hydro, storage, grid technology, dan energy services dapat menjadi sektor pertumbuhan baru. Indonesia perlu membangun supply chain domestik secara realistis, memilih bagian yang memiliki comparative advantage.

Grid modernization sangat penting. Sistem dengan proporsi energi terbarukan tinggi memerlukan fleksibilitas, penyimpanan, forecasting, dan interkoneksi. Investasi jaringan sering kurang terlihat dibanding pembangkit, tetapi menentukan keberhasilan transisi.

Harga energi juga sensitif secara politik. Subsidi dapat melindungi rumah tangga, tetapi subsidi yang tidak tepat sasaran mahal dan dapat mengurangi insentif efisiensi. Reformasi perlu bertahap, didukung data, dan mengompensasi kelompok rentan.

Kebijakan karbon global semakin memengaruhi perdagangan. Produk berintensitas karbon tinggi dapat menghadapi biaya tambahan. Karena itu, dekarbonisasi industri bukan hanya agenda lingkungan, tetapi competitiveness strategy.

Stabilitas politik memberi kesempatan untuk membuat roadmap jangka panjang. Investor energi membutuhkan kepastian puluhan tahun. Namun roadmap harus credible: target, regulasi, tender, jaringan, dan skema pembiayaan harus konsisten.

Transisi energi adalah contoh jelas bahwa kemakmuran modern memerlukan kemampuan mengelola perubahan. Menjaga sistem lama sepenuhnya mungkin terlihat stabil dalam jangka pendek, tetapi meningkatkan risiko jangka panjang. Stabilitas yang produktif adalah kemampuan bergerak menuju sistem baru tanpa menimbulkan dislokasi sosial yang berlebihan.

34. Pendalaman: Pangan, Petani, dan Politik Harga

Pangan merupakan isu ekonomi yang sekaligus sangat politis. Harga pangan memengaruhi inflasi, kemiskinan, upah riil, dan persepsi publik terhadap pemerintah. Karena konsumsi pangan memiliki proporsi besar pada rumah tangga berpendapatan rendah, kenaikan harga pangan bersifat regresif.

Namun menjaga harga konsumen rendah secara artifisial dapat merugikan petani. Kebijakan pangan harus menyelesaikan dua tujuan: affordable food dan viable farming. Kuncinya adalah produktivitas. Jika hasil per

hektare naik, kehilangan pascapanen turun, logistik membaik, dan input lebih efisien, pendapatan petani dapat naik tanpa harus mendorong harga konsumen tinggi.

Struktur pertanian Indonesia didominasi usaha kecil. Fragmentasi lahan, akses pembiayaan, teknologi, dan risiko iklim menjadi tantangan. Koperasi modern, platform agregasi, contract farming yang adil, dan mekanisasi bersama dapat menciptakan skala ekonomi tanpa harus menghapus kepemilikan kecil.

Informasi pasar juga penting. Petani sering menghadapi asymmetry dibanding pedagang besar. Digital platforms dapat membantu, tetapi memerlukan organisasi produsen dan logistik. Harga transparan tanpa kemampuan mengirim barang belum cukup.

Cadangan pangan dan kebijakan impor memiliki fungsi stabilisasi, tetapi timing sangat penting. Impor terlambat gagal menahan harga; impor berlebihan saat panen merugikan petani. Karena itu, keputusan harus berbasis data produksi dan stok yang terpercaya.

Perubahan iklim menambah volatilitas. Sistem irigasi, varietas tahan iklim, asuransi pertanian, early warning, dan diversifikasi perlu diperkuat. Food security harus dipahami sebagai resilience of systems, bukan hanya jumlah produksi nasional.

Nutrisi juga bagian dari kemakmuran. Ketersediaan kalori tidak otomatis menghasilkan diet sehat. Kebijakan perlu memperhatikan protein, buah, sayur, dan kualitas pangan. Human capital dimulai dari nutrisi.

Dalam konteks stabilitas, harga pangan adalah indikator yang sangat dirasakan. Pemerintah dapat memiliki pertumbuhan tinggi, tetapi lonjakan kebutuhan pokok cepat mengubah persepsi. Karena itu, food system reform merupakan investasi dalam stabilitas sosial sekaligus produktivitas.

Indonesia dapat bergerak dari paradigma swasembada sempit menuju food system competitiveness: produksi efisien, perdagangan adaptif, logistik modern, kesejahteraan petani, dan nutrisi masyarakat. Pendekatan ini lebih konsisten dengan tujuan kemakmuran daripada mengejar satu indikator produksi.

35. Pendalaman: AI, Otomatisasi, dan Kontrak Sosial Baru

AI generatif mempercepat perubahan yang sebelumnya diasosiasikan dengan otomatisasi industri. Kini bukan hanya pekerjaan manual yang berubah, tetapi juga penulisan, analisis, desain, customer service, coding, hukum, akuntansi, dan pendidikan. Dampaknya pada Indonesia akan sangat bergantung pada kecepatan adopsi dan kemampuan tenaga kerja beradaptasi.

AI dapat meningkatkan produktivitas secara besar jika digunakan sebagai augmentation. Dokter dapat merangkum catatan lebih cepat, dosen membuat materi adaptif, UMKM menyusun promosi, analis mengolah data, dan birokrasi memproses dokumen. Namun penggunaan efektif membutuhkan domain expertise. AI yang dipakai oleh pengguna tanpa kemampuan mengevaluasi output dapat memperbesar kesalahan.

Karena itu, AI literacy harus menjadi kompetensi umum, tetapi bukan sekadar prompt engineering. Literasi mencakup memahami kemampuan dan keterbatasan, verifikasi, privasi, bias, keamanan, dan integrasi ke workflow.

Dampak pasar kerja cenderung heterogen. Beberapa tugas hilang, tugas baru muncul, dan banyak pekerjaan berubah komposisi. Tantangan terbesar bukan pengangguran massal seketika, melainkan transition friction: pekerja tidak memiliki keterampilan tepat saat demand berubah.

Sistem perlindungan sosial perlu beradaptasi terhadap karier yang lebih cair. Portability benefits, lifelong learning accounts, dan dukungan transisi menjadi relevan. Pendidikan formal saja tidak cukup karena teknologi berubah lebih cepat daripada kurikulum.

AI juga dapat meningkatkan konsentrasi ekonomi karena membutuhkan data, komputasi, dan modal. Kebijakan perlu menjaga open ecosystems, akses cloud, kompetisi, dan interoperabilitas. Indonesia dapat fokus pada adoption dan domain-specific applications, bukan hanya mengejar model fondasi terbesar.

Dalam politik, deepfake dan disinformasi mengancam trust. Mekanisme verifikasi konten, digital provenance, media literacy, dan respons cepat institusi pemilu perlu dikembangkan. Regulasi harus menjaga integritas tanpa menjadi alat pembatasan kritik.

Pemerintah juga akan menggunakan AI. Keputusan administratif seperti targeting bantuan atau risk scoring dapat lebih efisien, tetapi berpotensi bias. High-impact systems membutuhkan audit dan hak warga untuk mengajukan keberatan.

Kontrak sosial baru di era AI harus memastikan bahwa productivity gains diterjemahkan menjadi shared prosperity. Jika keuntungan hanya terkonsentrasi pada pemilik modal teknologi, kesenjangan meningkat. Kebijakan pendidikan, kompetisi, perpajakan, dan perlindungan sosial menentukan distribusi.

Dengan demikian, AI menguji kemampuan Indonesia mengubah stabilitas menjadi adaptability. Negara yang stabil tetapi lamban mengadopsi teknologi dapat tertinggal; negara yang agresif tanpa governance dapat menimbulkan backlash. Keseimbangan inovasi dan perlindungan menjadi kunci.

36. Pendalaman: Politik Fiskal, Pajak, dan Kontrak Warga-Negara

Pajak merupakan salah satu hubungan paling konkret antara warga dan negara. Ketika warga membayar pajak, mereka menyerahkan sebagian sumber daya dengan harapan negara menyediakan keamanan, infrastruktur, layanan, dan aturan. Karena itu, perpajakan bukan hanya instrumen fiskal, tetapi kontrak politik.

Negara yang ingin menyediakan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pertahanan, dan infrastruktur berkualitas membutuhkan basis penerimaan yang memadai. Namun menaikkan penerimaan secara berkelanjutan memerlukan legitimacy. Kepatuhan sukarela tumbuh ketika sistem dianggap fair dan layanan terlihat.

Fairness pajak memiliki beberapa dimensi: vertical equity, horizontal equity, dan procedural fairness. Warga dengan kemampuan lebih besar umumnya diharapkan berkontribusi lebih, sementara wajib pajak dengan kondisi sebanding perlu diperlakukan sama. Prosedur audit dan keberatan harus jelas.

Digitalisasi administrasi pajak memungkinkan matching data dan menurunkan evasion, tetapi juga menambah isu privasi. Data harus digunakan sesuai tujuan dan dilindungi. Kesalahan sistem harus dapat dikoreksi.

Dari sisi belanja, masyarakat perlu melihat hubungan antara pajak dan hasil. Transparansi anggaran yang terlalu teknis tidak cukup; perlu citizen-oriented reporting. Misalnya, berapa biaya per siswa dan bagaimana learning outcomes berubah.

Defisit fiskal kadang diperlukan untuk stabilisasi ekonomi atau investasi. Pertanyaan bukan apakah utang selalu buruk, tetapi apakah utang membiayai kegiatan yang meningkatkan kapasitas pembayaran masa

depan. Infrastruktur produktif dan human capital dapat memiliki social return tinggi; belanja konsumtif permanen yang dibiayai utang lebih berisiko.

Risiko fiskal jangka panjang seperti pensiun, BUMN, perubahan iklim, dan kesehatan perlu masuk perencanaan. Pemerintah sebaiknya memiliki fiscal risk statement yang mudah dipahami.

Dalam ekonomi politik, pajak juga membentuk citizenship. Negara yang bergantung kuat pada pajak warga memiliki insentif lebih besar untuk responsif dibanding negara yang terutama bergantung pada rente sumber daya. Karena itu, memperkuat tax state dapat memperkuat accountability.

Indonesia perlu menjaga keseimbangan: memperluas basis pajak tanpa membebani usaha kecil secara berlebihan, meningkatkan kepatuhan kelompok berpendapatan tinggi, menyederhanakan administrasi, dan menunjukkan kualitas belanja. Keberhasilan reformasi fiskal pada akhirnya diukur dari apakah masyarakat melihat negara sebagai value-producing institution.

37. Pendalaman: Infrastruktur, Logistik, dan Integrasi Ekonomi Kepulauan

Sebagai negara kepulauan, biaya logistik memiliki arti strategis bagi Indonesia. Infrastruktur bukan hanya aset fisik; ia menghubungkan produsen dengan pasar, pekerja dengan pekerjaan, dan daerah dengan jaringan nasional. Jalan, pelabuhan, bandara, rel, gudang, listrik, dan internet secara bersama membentuk economic geography.

Pembangunan infrastruktur besar selama beberapa tahun terakhir memperbaiki konektivitas. Tantangan berikutnya adalah utilization dan maintenance. Infrastruktur yang dibangun tetapi tidak terhubung ke kawasan produksi menghasilkan return rendah. Karena itu, perencanaan perlu mengintegrasikan transportasi dengan tata ruang, industri, dan logistik.

Pelabuhan memiliki peran khusus. Efisiensi tidak hanya ditentukan oleh kapasitas dermaga, tetapi dwell time, customs, digital documentation, hinterland connectivity, dan shipping networks. Integrasi data dapat mengurangi waktu dan biaya.

Cold chain sangat penting bagi pangan dan perikanan. Tanpa rantai dingin, kehilangan hasil tinggi dan wilayah produksi sulit mengakses pasar premium. Investasi ini dapat meningkatkan pendapatan petani dan nelayan sekaligus menurunkan volatilitas harga.

Infrastruktur digital kini setara pentingnya. Broadband memungkinkan jasa jarak jauh, e-commerce, pendidikan, dan telemedicine. Namun coverage saja tidak cukup; affordability, speed, dan digital skills menentukan penggunaan.

Pembiayaan infrastruktur perlu memperhatikan lifecycle costs. Fokus politik sering pada proyek baru karena terlihat, sementara maintenance kurang menarik. Padahal jalan rusak atau jaringan air bocor mengurangi return investasi. Asset management harus menjadi budaya birokrasi.

Public-private partnerships dapat membantu, tetapi risiko harus dialokasikan pada pihak yang paling mampu mengelolanya. Demand risk, construction risk, dan regulatory risk tidak boleh secara otomatis ditanggung pemerintah.

Dari perspektif pemerataan, infrastruktur dapat mengurangi kesenjangan, tetapi juga dapat memperkuat pusat bila hanya membuat sumber daya daerah lebih mudah diekspor tanpa membangun aktivitas lokal. Karena itu, connectivity harus dipasangkan dengan capability building.

Stabilitas politik memungkinkan proyek infrastruktur jangka panjang, namun kemakmuran tergantung pada kualitas seleksi proyek. Cost-benefit analysis, transparansi, dan ex-post evaluation diperlukan agar pembangunan fisik benar-benar mengubah produktivitas.

38. Pendalaman: Lingkungan, Biodiversitas, dan Ekonomi Kemakmuran

Kemakmuran konvensional sering diukur melalui produksi tahunan, sementara degradasi lingkungan diperlakukan sebagai externality. Pendekatan ini bermasalah bagi Indonesia yang memiliki hutan tropis, biodiversitas, pesisir, dan sumber daya alam besar. Natural capital adalah aset ekonomi.

Deforestasi, pencemaran, hilangnya mangrove, penurunan kualitas tanah, dan kerusakan terumbu karang mengurangi kemampuan ekosistem menyediakan jasa: air, perlindungan banjir, penyerapan karbon, perikanan, pariwisata, dan kesehatan. Kerusakan hari ini dapat menaikkan PDB melalui aktivitas ekstraksi tetapi menurunkan kekayaan nasional jangka panjang.

Karena itu, kebijakan perlu bergerak ke wealth accounting. Keberhasilan pembangunan diukur tidak hanya dari flow of income, tetapi perubahan stock of capital: manusia, fisik, institusional, dan alam.

Indonesia memiliki peluang besar dalam bioeconomy dan nature-based solutions. Hutan dan laut dapat menghasilkan nilai melalui produk berkelanjutan, jasa ekosistem, karbon, bioteknologi, dan pariwisata. Tetapi mekanisme manfaat harus melibatkan masyarakat lokal.

Konflik lingkungan sering menjadi sumber ketidakstabilan lokal. Sengketa tanah dan izin dapat berlangsung lama. Rule of law, free prior information, partisipasi, dan mekanisme kompensasi yang adil penting untuk social license.

Perusahaan menghadapi tuntutan traceability dari pasar global. Produk yang terkait deforestasi atau pelanggaran sosial dapat kehilangan akses pasar. Dengan demikian, standar lingkungan semakin menjadi trade requirement.

Perubahan iklim memperbesar pentingnya resilience. Kota perlu drainase dan ruang hijau, pesisir membutuhkan perlindungan, pertanian membutuhkan adaptasi, dan kesehatan harus mengantisipasi penyakit terkait iklim.

Investasi hijau dapat menjadi mesin pertumbuhan jika Indonesia membangun teknologi dan jasa domestik. Energy efficiency, waste management, circular economy, dan ecosystem restoration menciptakan pekerjaan baru.

Stabilitas politik yang mengabaikan ekologi pada akhirnya tidak stabil karena kerusakan menimbulkan biaya sosial. Kemakmuran yang berkelanjutan membutuhkan hubungan baru antara ekonomi dan alam: pertumbuhan harus menjaga basis sumber daya yang memungkinkan pertumbuhan itu sendiri.

39. Pendalaman: Geopolitik, Rantai Pasok, dan Strategi Indonesia

Indonesia beroperasi dalam dunia yang semakin multipolar. Persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok, konflik regional, perubahan aturan perdagangan, kebijakan industri negara maju, dan fragmentasi teknologi memengaruhi pilihan ekonomi. Stabilitas domestik tidak dapat dipisahkan dari ketidakpastian eksternal.

Posisi Indonesia memiliki keuntungan karena pasar besar, sumber daya strategis, dan lokasi di jalur maritim penting. Strategi terbaik adalah memperluas option value: membangun hubungan ekonomi beragam dan menghindari ketergantungan ekstrem pada satu pasar, teknologi, atau sumber pembiayaan.

Rantai pasok global bergerak dari just-in-time ke just-in-case. Perusahaan mencari diversifikasi pemasok. Indonesia dapat menarik investasi jika menawarkan stabilitas, infrastruktur, tenaga kerja, dan pasar. Namun competition for investment tinggi. Negara lain juga menawarkan insentif.

Karena itu, Indonesia harus bersaing melalui ecosystem quality, bukan hanya tax holidays. Investor teknologi membutuhkan insinyur, pemasok, listrik andal, data connectivity, customs cepat, dan perlindungan IP.

Geopolitik juga menyentuh semikonduktor, cloud, AI, dan cybersecurity. Ketergantungan pada teknologi asing sulit dihindari, tetapi strategic autonomy dapat dibangun melalui diversifikasi vendor, local capabilities, open standards, dan keamanan.

Kebijakan perdagangan perlu pragmatis. Proteksi dapat memberi ruang belajar, tetapi integrasi global penting untuk skala dan teknologi. Export discipline dapat memaksa perusahaan memenuhi standar internasional.

ASEAN memberi platform penting. Integrasi regional memperluas pasar dan bargaining power. Indonesia dapat mendorong interoperability digital, energy connectivity, supply-chain resilience, dan pembayaran regional.

Dalam kondisi geopolitik tegang, stabilitas politik Indonesia menjadi nilai tambah. Namun nilai tambah itu hanya maksimal jika diterjemahkan menjadi policy predictability dan diplomasi ekonomi yang konsisten.

Kemakmuran di era geopolitik baru memerlukan strategic flexibility. Indonesia harus mempunyai tujuan jangka panjang yang jelas tetapi mampu beradaptasi terhadap perubahan aliansi dan teknologi. Ini selaras dengan konsep stabilitas adaptif yang menjadi tema utama artikel.

40. Pendalaman: Reformasi Birokrasi dari Kepatuhan ke Kinerja

Birokrasi adalah mesin yang mengubah keputusan politik menjadi hasil. Banyak kebijakan bagus gagal bukan pada desain, tetapi pada implementasi. Karena itu, reformasi birokrasi merupakan agenda ekonomi inti.

Model birokrasi tradisional menekankan compliance terhadap prosedur. Compliance penting untuk mencegah penyalahgunaan, tetapi jika berlebihan dapat menghasilkan process orientation: pejabat dianggap berhasil karena mengikuti langkah, meskipun outcome buruk. Reformasi perlu bergerak menuju accountable performance.

Kinerja sektor publik sulit diukur karena tujuan kompleks. Namun indikator dapat dirancang berlapis: input, output, outcome, dan impact. Misalnya, jumlah pelatihan guru adalah output; peningkatan kemampuan siswa adalah outcome. Pemerintah perlu menghindari vanity metrics.

Data menjadi kunci. Sistem administrasi yang terfragmentasi membuat evaluasi sulit. Interoperabilitas data dapat meningkatkan koordinasi, tetapi harus disertai governance.

Manajemen talenta juga penting. Negara membutuhkan spesialis data, procurement, cybersecurity, ekonomi, hukum, dan engineering. Career path perlu memungkinkan keahlian teknis berkembang tanpa semua orang harus menjadi manajer umum.

Mobilitas talenta antara pusat-daerah dan antarinstansi dapat menyebarkan kemampuan. Namun rotasi yang terlalu sering dapat menghilangkan institutional memory. Keseimbangan diperlukan.

Budaya organisasi perlu mengizinkan experimentation. Pejabat sering menghindari inovasi karena takut disalahkan bila gagal. Safe-to-fail pilots dan evaluasi dapat mendorong learning, selama integritas dijaga.

Reformasi birokrasi juga memerlukan simplifikasi organisasi. Koordinasi terlalu banyak lembaga meningkatkan transaction costs. Tetapi konsolidasi tidak selalu solusi; kejelasan mandat dan mekanisme koordinasi sering lebih penting.

Stabilitas politik memberi kesempatan membangun civil service jangka panjang. Birokrasi profesional menjaga continuity ketika pemerintah berganti. Ini salah satu bentuk institutional stability paling penting.

Pada akhirnya, masyarakat tidak merasakan stabilitas melalui pidato; mereka merasakannya ketika administrasi mudah, layanan cepat, hukum konsisten, dan pejabat responsif. Kualitas birokrasi adalah wajah sehari-hari dari negara.

41. Pendalaman: Investasi Berkualitas dan Foreign Direct Investment yang Transformatif

Investasi adalah salah satu saluran utama yang menghubungkan stabilitas politik dengan kemakmuran ekonomi. Ketika risiko politik menurun, biaya modal dan ketidakpastian ikut berkurang sehingga proyek jangka panjang menjadi lebih layak. Namun besarnya investasi tidak otomatis menunjukkan kualitas transformasi. Investasi yang hanya memperluas kapasitas ekstraksi, mengandalkan impor teknologi, dan memiliki sedikit hubungan dengan pemasok domestik dapat mendorong PDB tetapi menghasilkan learning effect yang terbatas. Karena itu, Indonesia perlu membedakan investment volume dari investment quality.

Investasi berkualitas setidaknya memiliki enam karakteristik. Pertama, menciptakan pekerjaan dengan produktivitas dan upah yang lebih tinggi. Kedua, membangun linkage dengan perusahaan lokal. Ketiga, mentransfer teknologi, standar, dan praktik manajemen. Keempat, memperluas ekspor dan diversifikasi produk. Kelima, mematuhi standar lingkungan dan sosial. Keenam, memperkuat basis pajak secara wajar. Kerangka penilaian investasi perlu menilai keenam unsur ini, tidak hanya nilai komitmen modal.

Foreign direct investment dapat memainkan peran penting karena perusahaan multinasional membawa akses pasar, teknologi, dan jaringan pemasok. Namun spillover tidak terjadi secara otomatis. Perusahaan lokal harus memiliki absorptive capacity. Jika kualitas pemasok domestik terlalu jauh tertinggal, perusahaan asing akan mengimpor input. Karena itu, supplier upgrading, standardisasi, sertifikasi, dan akses pembiayaan perlu berjalan bersamaan dengan promosi investasi.

Kawasan industri dapat menjadi instrumen penting apabila dirancang sebagai ekosistem pembelajaran. Kedekatan geografis memungkinkan pemasok, tenaga kerja, universitas, laboratorium, dan perusahaan berinteraksi. Tetapi kawasan yang hanya menyediakan tanah dan utilitas tanpa knowledge infrastructure akan menghasilkan aglomerasi fisik, bukan aglomerasi kapabilitas.

Kebijakan insentif investasi juga harus disiplin. Tax holiday, fasilitas lahan, atau dukungan infrastruktur memiliki opportunity cost. Pemerintah perlu membandingkan manfaat dan biaya, serta menghindari race to the bottom. Insentif sebaiknya dikaitkan dengan target yang dapat diverifikasi seperti pelatihan tenaga kerja, ekspor, penggunaan energi bersih, kegiatan R&D, atau pengembangan pemasok. Dengan demikian, dukungan publik memperoleh public return.

Stabilitas kebijakan sangat penting. Investor tidak hanya menghitung tarif pajak, tetapi juga risiko perubahan peraturan, konflik pusat-daerah, izin lingkungan, dan kepastian lahan. Oleh karena itu, investment climate pada dasarnya adalah institutional climate. Proses yang cepat namun tidak transparan dapat mengurangi risiko waktu tetapi menambah risiko legal di kemudian hari. Yang dibutuhkan adalah speed with due process.

Indonesia juga perlu mengembangkan strategi aftercare. Pemerintah sering fokus menarik investor baru, padahal perusahaan yang sudah beroperasi dapat memperluas investasi jika masalah mereka ditangani. Aftercare yang baik membantu mengidentifikasi bottleneck logistik, tenaga kerja, regulasi, dan pemasok. Informasi ini menjadi input reformasi.

Data semester I-2026 yang menunjukkan realisasi investasi lebih dari Rp1.010 triliun merupakan modal penting. Pertanyaan strategis selanjutnya adalah apakah realisasi tersebut meningkatkan economic complexity. Pemerintah dapat mempublikasikan indikator seperti jumlah pemasok domestik, proporsi pekerjaan teknis, belanja R&D, dan ekspor produk bernilai tambah. Dengan begitu, masyarakat dapat menilai investasi dari manfaat strukturalnya.

Dalam jangka panjang, FDI terbaik adalah yang membuat negara tuan rumah lebih mampu. Jika setelah dua dekade industri tetap sepenuhnya bergantung pada teknologi dan manajemen dari luar, spillover belum optimal. Sebaliknya, bila muncul perusahaan lokal baru, insinyur berpengalaman, laboratorium, standar tinggi, dan kemampuan ekspor, investasi telah menjadi transformasional.

Stabilitas politik memberi Indonesia kesempatan untuk membangun reputasi sebagai lokasi investasi jangka panjang. Reputasi itu perlu diperdalam dengan institusi, talenta, dan ekosistem. Dalam persaingan global, negara yang hanya menawarkan biaya murah mudah digantikan; negara yang menawarkan capability ecosystem lebih sulit digantikan. Itulah basis kemakmuran yang lebih tahan lama.

42. Pendalaman: Inovasi, Riset, dan Ekonomi Pengetahuan

Kemakmuran jangka panjang semakin ditentukan oleh kemampuan menghasilkan dan menggunakan pengetahuan. Negara yang hanya mengandalkan sumber daya alam atau biaya tenaga kerja rendah akan menghadapi batas. Ketika upah naik, keunggulan biaya berkurang. Jalan keluar adalah meningkatkan produktivitas melalui inovasi, kualitas, desain, teknologi, dan organisasi.

Inovasi tidak selalu berarti penemuan ilmiah frontier. Bagi banyak perusahaan Indonesia, inovasi dapat berupa perbaikan proses produksi, penggunaan data, pengurangan waste, packaging baru, model bisnis digital, atau adaptasi mesin. Karena itu, kebijakan inovasi harus mencakup diffusion, bukan hanya invention. Teknologi yang sudah tersedia secara global dapat meningkatkan produktivitas besar jika diadopsi luas.

Namun diffusion memerlukan kemampuan absorpsi. Perusahaan perlu manajer yang mampu mengubah proses, pekerja terampil, pembiayaan, dan akses pada konsultan atau universitas. Program extension services untuk manufaktur dan UMKM dapat membantu. Beberapa negara maju memiliki lembaga yang mendampingi perusahaan meningkatkan kualitas, lean production, digitalisasi, dan standardisasi. Model seperti ini relevan bagi Indonesia.

Riset dasar tetap penting karena membangun pengetahuan dan talenta. Universitas yang hanya berorientasi pengajaran sulit menghasilkan ekosistem inovasi. Pembiayaan riset perlu stabil, kompetitif, dan memungkinkan proyek multi-tahun. Evaluasi harus menghargai kualitas dan dampak, bukan hanya jumlah publikasi.

Hubungan universitas-industri sering terhambat oleh perbedaan insentif. Akademisi mengejar publikasi, perusahaan mengejar solusi cepat, dan aturan pengadaan atau kekayaan intelektual dapat kaku. Diperlukan technology transfer offices, skema matching grants, laboratorium bersama, dan mekanisme IP yang jelas.

Inovasi juga memerlukan toleransi terhadap kegagalan. Banyak eksperimen tidak berhasil. Sistem yang menghukum setiap kegagalan akan menghasilkan konservatisme. Namun toleransi bukan berarti tanpa akuntabilitas. Negara harus membedakan failure from experimentation dengan failure from negligence atau corruption. Ini membutuhkan governance yang matang.

Venture capital dan startup merupakan bagian dari ekosistem, tetapi tidak semua inovasi harus berbentuk startup digital. Inovasi industri, pertanian, kesehatan, dan layanan publik sama pentingnya. Kebijakan sebaiknya menghindari hype dan fokus pada problem-solving.

Intellectual property rights harus seimbang. Perlindungan terlalu lemah mengurangi insentif inovasi; terlalu kuat dapat membatasi diffusion. Sistem lisensi, patent examination, dan dispute resolution perlu efisien.

AI mempercepat inovasi karena membantu desain, simulasi, coding, dan analisis. Namun negara memerlukan akses komputasi dan data. Shared research infrastructure dapat menurunkan biaya bagi universitas dan startup.

Stabilitas politik memungkinkan investasi riset yang hasilnya jangka panjang. Tetapi risiko terbesar adalah perubahan prioritas setiap periode. Indonesia memerlukan mission-oriented innovation pada beberapa tema strategis seperti pangan, kesehatan tropis, energi, maritim, biodiversitas, dan AI. Misi harus cukup luas untuk mendorong berbagai solusi, namun cukup konkret untuk diukur.

Ekonomi pengetahuan pada akhirnya bergantung pada budaya. Organisasi perlu menghargai pertanyaan, eksperimen, dan pembelajaran. Negara yang sangat hierarkis dan takut salah sulit inovatif. Karena itu, kemakmuran berbasis inovasi membutuhkan stabilitas yang memberi psychological safety bagi peneliti, pekerja, dan entrepreneur untuk mencoba hal baru.

43. Pendalaman: Kesehatan Publik sebagai Infrastruktur Produktivitas

Kesehatan sering dibahas sebagai sektor sosial, padahal ia juga merupakan infrastruktur ekonomi. Pekerja yang sehat lebih produktif, anak yang sehat belajar lebih baik, dan rumah tangga yang terlindungi dari biaya kesehatan katastrofik lebih mampu menabung dan berinvestasi. Pandemi COVID-19 memperlihatkan bahwa sistem kesehatan dapat menentukan stabilitas ekonomi secara langsung.

Indonesia telah memperluas jaminan kesehatan secara signifikan. Tantangan berikutnya adalah kualitas, efisiensi, dan keberlanjutan. Coverage formal tidak selalu berarti akses efektif. Waktu tunggu, distribusi tenaga kesehatan, ketersediaan obat, kualitas fasilitas, dan rujukan menentukan pengalaman masyarakat.

Primary care harus diperkuat karena banyak penyakit kronis dapat dicegah atau dikendalikan sebelum membutuhkan perawatan mahal. Diabetes, hipertensi, obesitas, penyakit jantung, dan penyakit terkait gaya hidup menjadi beban yang meningkat seiring pendapatan dan urbanisasi. Pencegahan memiliki return ekonomi tinggi.

Digital health dapat memperluas akses, tetapi perlu interoperabilitas rekam medis dan perlindungan data. AI dapat membantu diagnosis dan triase, namun harus divalidasi pada populasi lokal. Sistem yang dikembangkan dengan data negara lain belum tentu akurat untuk Indonesia.

Distribusi dokter dan tenaga kesehatan antarwilayah merupakan isu pemerataan. Insentif finansial saja mungkin tidak cukup; diperlukan fasilitas, career path, pendidikan lokal, dan dukungan telemedicine. Universitas daerah dapat memainkan peran penting.

Industri kesehatan juga mempunyai potensi ekonomi. Alat kesehatan, farmasi, biotech, dan layanan kesehatan dapat menjadi sektor bernilai tambah. Pandemi menunjukkan pentingnya resilience supply chain. Namun local content policy perlu memperhatikan kualitas dan skala agar tidak menaikkan biaya tanpa meningkatkan kemampuan.

Kesehatan mental semakin relevan, terutama bagi generasi muda dan pekerja urban. Stres, insecurity, dan perubahan teknologi dapat memengaruhi produktivitas. Kebijakan perusahaan dan layanan publik perlu mengakui hal ini.

Dari perspektif stabilitas, ketidakadilan akses kesehatan dapat mengikis trust. Masyarakat menilai fairness negara ketika menghadapi penyakit. Sistem yang responsif memperkuat kontrak sosial.

Investasi kesehatan sebaiknya dievaluasi bukan hanya sebagai cost center, tetapi melalui human-capital return. Hari kerja yang terselamatkan, learning gains, dan pengurangan catastrophic spending merupakan manfaat ekonomi.

Karena itu, perjalanan menuju kemakmuran harus memasukkan health security. Negara yang tumbuh cepat tetapi penduduknya rentan terhadap biaya kesehatan tidak sepenuhnya makmur. Kesehatan adalah kemampuan dasar yang memungkinkan manusia memanfaatkan kesempatan ekonomi.

44. Pendalaman: Urbanisasi, Kota Produktif, dan Kualitas Hidup

Urbanisasi merupakan salah satu mesin transformasi struktural. Kota memungkinkan aglomerasi perusahaan, pekerja, universitas, dan jasa. Produktivitas biasanya lebih tinggi di kota karena kedekatan mengurangi biaya pencarian dan mempercepat pertukaran pengetahuan. Namun aglomerasi memiliki batas jika kemacetan, polusi, harga rumah, banjir, dan ketimpangan meningkat.

Indonesia akan semakin urban. Karena itu, kualitas manajemen kota menentukan kemakmuran nasional. Kota tidak boleh hanya menjadi tempat menampung pertumbuhan penduduk; ia harus menjadi productivity platform.

Transportasi massal merupakan investasi produktivitas. Setiap jam yang hilang di jalan adalah biaya ekonomi. Integrasi transit dengan tata guna lahan memungkinkan pembangunan lebih padat di sekitar stasiun dan mengurangi kebutuhan perjalanan jauh. Transit-oriented development juga dapat mendukung perumahan terjangkau jika dirancang inklusif.

Perumahan adalah tantangan besar. Pasar tanah di kota produktif cenderung mahal. Jika pasokan rumah tidak responsif, pekerja berpendapatan menengah dan rendah terdorong ke pinggiran. Kebijakan perlu memperbaiki zoning, perizinan, land value capture, rental housing, dan transportasi.

Kota juga rentan iklim. Drainase, ruang hijau, sungai, dan tata bangunan perlu menghadapi hujan ekstrem dan panas. Nature-based solutions dapat melengkapi infrastruktur abu-abu.

Smart city sebaiknya tidak identik dengan banyak sensor. Kota pintar adalah kota yang menggunakan data untuk memecahkan masalah warga: kemacetan, sampah, banjir, keamanan, kesehatan, dan layanan. Teknologi harus mengikuti problem definition.

Pemerintahan metropolitan sering terfragmentasi. Aktivitas ekonomi melintasi batas kota-kabupaten. Karena itu, diperlukan koordinasi untuk transportasi, tata ruang, air, dan sampah. Tanpa itu, satu daerah dapat memindahkan masalah ke daerah lain.

Kualitas ruang publik juga berpengaruh pada kohesi sosial. Taman, trotoar, perpustakaan, dan fasilitas komunitas menciptakan tempat interaksi. Kota yang hanya berorientasi kendaraan dan pusat komersial dapat meningkatkan segregasi.

Ekonomi kreatif, jasa profesional, pendidikan, dan teknologi tumbuh di kota dengan kualitas hidup tinggi. Talent attraction menjadi bagian dari daya saing. Profesional muda memilih lokasi berdasarkan pekerjaan sekaligus lingkungan, budaya, mobilitas, dan keamanan.

Stabilitas politik pada skala nasional harus diterjemahkan menjadi governance perkotaan yang stabil. Perubahan kebijakan tata ruang yang mendadak atau perizinan yang tidak konsisten mengurangi investasi. Sebaliknya, perencanaan jangka panjang yang transparan dapat menciptakan kepastian.

Indonesia tidak akan mencapai kemakmuran tinggi tanpa kota yang produktif dan layak huni. Urban policy dengan demikian adalah national economic policy.

45. Pendalaman: Sektor Informal, UMKM, dan Jalan Menuju Formalisasi Produktif

UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia dalam jumlah unit usaha dan penyerapan tenaga kerja. Namun banyak usaha beroperasi pada produktivitas rendah, margin tipis, dan informal. Tantangan kebijakan adalah membantu mereka tumbuh tanpa membebani dengan regulasi yang tidak proporsional.

Formalisasi sering dipandang sebagai proses administratif: mendaftarkan usaha, memperoleh izin, dan membayar pajak. Pendekatan ini tidak cukup. Pelaku usaha akan formal bila manfaat lebih besar daripada biaya. Manfaat dapat berupa akses kredit, kontrak pemerintah, platform pasar, pelatihan, perlindungan hukum, dan jaminan sosial.

Digitalisasi membuka peluang formalisasi karena transaksi meninggalkan jejak data. Pembayaran digital dapat membantu membangun credit history. Namun kebijakan harus berhati-hati agar digital footprint tidak langsung diterjemahkan menjadi beban pajak yang menakutkan usaha mikro. Tahapan diperlukan.

Produktivitas UMKM dapat ditingkatkan melalui management practices. Riset internasional menunjukkan kualitas manajemen memengaruhi produktivitas. Program sederhana seperti pencatatan keuangan, inventory control, standard operating procedures, dan pemasaran berbasis data dapat memberi dampak besar.

Cluster approach dapat mengurangi biaya. UMKM dalam klaster dapat berbagi fasilitas, sertifikasi, mesin, logistik, dan pelatihan. Koperasi modern juga dapat memainkan peran agregasi bila dikelola profesional.

Akses pembiayaan tetap penting, tetapi kredit bukan solusi jika model bisnis lemah. Pendampingan dan market access harus berjalan bersama pembiayaan. Kredit yang dipaksakan dapat meningkatkan utang tanpa produktivitas.

Pengadaan pemerintah dapat menjadi instrumen pengembangan UMKM, tetapi perlu menjaga kualitas dan kompetisi. Set-aside tanpa upgrading berisiko menciptakan ketergantungan. Program supplier development lebih berkelanjutan.

AI dapat membantu UMKM, tetapi solusi harus mudah dan murah. Template otomatis, chatbot, analitik penjualan, dan desain konten dapat meningkatkan efisiensi. Pemerintah dapat menyediakan literasi dan sandbox.

Sektor informal juga mencakup pekerja mandiri dan gig workers. Perlindungan sosial perlu portable dan tidak bergantung pada satu pemberi kerja. Model iuran fleksibel dapat dikembangkan.

Stabilitas ekonomi rumah tangga sering bergantung pada UMKM. Karena itu, kebijakan UMKM bukan semata kebijakan bisnis kecil, tetapi kebijakan sosial. Namun tujuan akhirnya harus naik kelas, bukan mempertahankan skala kecil selamanya. Sebagian usaha akan tetap kecil secara efisien, tetapi yang potensial tumbuh harus memiliki jalan menuju formalitas, produktivitas, dan pasar lebih besar.

46. Pendalaman: Politik Informasi, Disinformasi, dan Stabilitas di Era Digital

Stabilitas politik modern semakin ditentukan oleh kualitas ekosistem informasi. Media sosial mempercepat partisipasi, tetapi juga mempercepat disinformasi, rumor, dan polarisasi. Algoritma platform cenderung mengutamakan engagement, sementara konten yang memicu emosi sering lebih viral daripada penjelasan yang seimbang.

Bagi ekonomi, disinformasi dapat memengaruhi kepercayaan konsumen, bank run, reputasi perusahaan, dan persepsi risiko. Deepfake memperbesar tantangan karena bukti audiovisual tidak lagi otomatis dapat dipercaya. Ekonomi informasi memasuki era authenticity crisis.

Respons pemerintah harus berhati-hati. Upaya melawan disinformasi tidak boleh menjadi alasan membatasi kritik sah. Solusi lebih tahan lama adalah membangun information resilience: literasi media, fact-checking independen, transparansi platform, provenance technology, dan komunikasi resmi yang cepat.

Institusi publik perlu mempunyai protocol krisis informasi. Ketika rumor menyebar, keterlambatan respons menciptakan vacuum yang diisi spekulasi. Namun respons harus berbasis fakta dan mengakui jika informasi belum lengkap.

Media profesional tetap penting. Model bisnis media menghadapi tekanan karena pendapatan iklan berpindah ke platform. Jika jurnalisme berkualitas melemah, ruang publik dipenuhi konten tanpa verifikasi. Kebijakan dapat mendukung ekosistem media tanpa mengurangi independensi, misalnya melalui transparansi iklan digital dan kompetisi platform.

Pendidikan perlu memasukkan epistemic literacy: bagaimana menilai sumber, membedakan korelasi dan kausalitas, memahami statistik, dan mengenali manipulasi. Ini penting untuk demokrasi dan juga keputusan bisnis.

AI generatif memungkinkan produksi konten skala besar dengan biaya rendah. Bot dapat membuat narasi seolah berasal dari banyak orang. Platform perlu meningkatkan deteksi coordinated inauthentic behavior. Namun deteksi harus transparan dan dapat diaudit.

Stabilitas politik yang bergantung pada kontrol informasi akan semakin sulit dipertahankan di era digital. Pendekatan yang lebih robust adalah membangun trust melalui keterbukaan dan kompetensi. Masyarakat yang percaya sumber resmi tidak mudah dipengaruhi rumor.

Dunia usaha juga perlu crisis communication. Satu video palsu dapat merusak reputasi. Verification channels dan digital signatures dapat membantu.

Pada akhirnya, information integrity adalah bagian dari national resilience. Negara perlu memastikan bahwa warga dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang cukup benar. Stabilitas demokratis tidak berarti keseragaman narasi; ia berarti kemampuan masyarakat berdebat dengan shared factual ground.

47. Pendalaman: Mengukur Kemakmuran di Luar PDB

PDB merupakan indikator penting karena mengukur nilai produksi, tetapi tidak dirancang sebagai ukuran lengkap kesejahteraan. PDB dapat naik ketika terjadi aktivitas yang memperbaiki kerusakan, sementara kehilangan biodiversitas atau waktu perjalanan tidak sepenuhnya tercatat. PDB juga tidak menunjukkan distribusi pendapatan.

Kemakmuran sebaiknya dipahami sebagai kombinasi income, security, capability, opportunity, dan sustainability. Income menunjukkan daya beli. Security menunjukkan ketahanan terhadap shock. Capability mencakup kesehatan dan pendidikan. Opportunity menunjukkan mobilitas. Sustainability memastikan kesejahteraan tidak dibeli dengan mengurangi kemampuan generasi mendatang.

Pendapatan median sering lebih informatif daripada rata-rata karena menggambarkan rumah tangga tengah. Median real income yang stagnan sementara PDB naik dapat menjelaskan rasa ketidakpuasan.

Wealth juga penting. Rumah tangga dengan aset memiliki buffer. Kepemilikan rumah, tabungan, pensiun, dan aset produktif memengaruhi keamanan. Ketimpangan kekayaan sering lebih tinggi daripada ketimpangan pendapatan.

Waktu adalah dimensi lain. Dua orang dengan pendapatan sama dapat memiliki kualitas hidup berbeda jika satu menghabiskan empat jam sehari untuk commute. Time poverty terutama memengaruhi perempuan yang menanggung unpaid care work.

Kualitas lingkungan harus masuk. Udara bersih, air, ruang hijau, dan iklim aman memiliki nilai yang tidak selalu tercermin dalam pasar. Natural capital accounting dapat membantu.

Subjective well-being juga memberi informasi, walau harus digunakan hati-hati. Survei kepuasan hidup dapat menangkap aspek yang hilang dari statistik ekonomi.

Kemakmuran regional perlu diukur dengan price-adjusted metrics karena biaya hidup berbeda. Upah nominal tinggi di kota mahal belum tentu berarti daya beli lebih tinggi.

Dashboard kesejahteraan seharusnya sederhana enough untuk publik tetapi kaya enough untuk kebijakan. Pemerintah dapat memilih indikator inti dan menerbitkan laporan tahunan.

Penting pula menghindari Goodhart's Law: ketika satu indikator menjadi target, ia dapat dimanipulasi atau kehilangan makna. Karena itu, beberapa indikator harus dibaca bersama.

Bagi stabilitas politik, ukuran yang lebih lengkap membantu menutup gap antara narasi pemerintah dan pengalaman warga. Jika pemerintah hanya menyampaikan pertumbuhan PDB sementara masyarakat merasakan biaya hidup dan pekerjaan tidak aman, trust menurun. Dashboard kemakmuran dapat membuat komunikasi lebih realistis.

Pada akhirnya, tujuan pembangunan bukan meningkatkan statistik tertentu, tetapi memperluas kemampuan manusia menjalani hidup yang mereka nilai. PDB tetap kompas penting, namun bukan peta lengkap.

48. Sintesis Akhir: Dari Politics of Stability ke Politics of Capability

Seluruh pembahasan artikel ini dapat diringkas melalui pergeseran paradigma. Politik pembangunan tahap awal sering berfokus pada stabilitas: mencegah konflik, menjaga kontinuitas pemerintah, dan mempertahankan makroekonomi. Paradigma ini penting, tetapi tidak cukup untuk negara yang ingin naik menjadi ekonomi berpendapatan tinggi. Tahap berikutnya memerlukan politics of capability, yaitu politik yang berkompetisi dalam kemampuan menyelesaikan masalah.

Dalam politics of capability, keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari ketenangan politik atau banyaknya proyek, tetapi dari peningkatan kapasitas warga, perusahaan, dan institusi. Pertanyaan utama berubah: apakah sekolah meningkatkan pembelajaran? Apakah investasi meningkatkan teknologi? Apakah hilirisasi membangun pemasok lokal? Apakah AI meningkatkan produktivitas pekerja? Apakah anggaran mengurangi kerentanan? Apakah daerah semakin mampu?

Paradigma capability juga mengubah hubungan pusat dan daerah. Pemerintah pusat tidak perlu mengendalikan semua keputusan, tetapi membangun platform, standar, dan data yang memungkinkan daerah berhasil. Daerah tidak sekadar membelanjakan transfer, tetapi mengembangkan keunggulan lokal.

Hubungan negara dan bisnis juga berubah. Perusahaan tidak hanya meminta insentif, tetapi menjadi partner dalam learning dan upgrading. Dukungan publik harus menghasilkan public value.

Hubungan negara dan warga berubah dari paternalistik menjadi kolaboratif. Warga bukan hanya penerima kebijakan, tetapi sumber informasi dan evaluator. Partisipasi meningkatkan kualitas diagnosis masalah.

Politics of capability membutuhkan birokrasi profesional. Banyak masalah modern terlalu kompleks untuk diselesaikan dengan slogan. Energi, AI, kesehatan, climate adaptation, dan industrial policy memerlukan expertise. Namun expertise harus tetap accountable kepada proses demokratis.

Dalam kerangka ini, stabilitas menjadi platform eksperimen. Negara yang stabil dapat menguji kebijakan, mengevaluasi, dan memperbaiki. Stabilitas tidak digunakan untuk membekukan sistem, tetapi untuk memberi ruang belajar.

Indonesia mempunyai modal untuk melakukan pergeseran ini. Skala pasar memberi peluang eksperimen besar; demografi memberi tenaga; sumber daya memberi modal; demokrasi memberi legitimasi; dan digitalisasi memberi alat. Tantangannya adalah koordinasi dan kualitas institusi.

Risiko terbesar adalah puas dengan capaian menengah. Pertumbuhan sekitar lima persen dapat terasa cukup dibanding banyak negara, tetapi untuk mengejar ekonomi berpendapatan tinggi dan memenuhi aspirasi generasi muda, produktivitas perlu meningkat. Tanpa transformasi, Indonesia dapat mengalami middle-income inertia: tetap tumbuh, tetapi terlalu lambat untuk mengejar frontier.

Karena itu, stability dividend harus diinvestasikan. Ketika kondisi makro relatif baik dan konflik besar tidak dominan, pemerintah mempunyai political space. Ruang ini sebaiknya digunakan untuk reformasi yang meningkatkan kapabilitas sebelum krisis memaksa.

Keberhasilan akhirnya akan terlihat bukan hanya di Jakarta atau pusat industri, tetapi di kehidupan rumah tangga: apakah anak mendapat pendidikan lebih baik daripada orang tuanya, apakah pekerja dapat meningkatkan keterampilan, apakah petani memperoleh produktivitas lebih tinggi, apakah UMKM naik kelas, apakah warga memperoleh layanan tanpa koneksi khusus, dan apakah generasi muda percaya masa depan layak diperjuangkan.

Kemakmuran adalah pengalaman sosial tentang kemungkinan. Masyarakat merasa makmur bukan hanya ketika memiliki lebih banyak, tetapi ketika melihat jalan untuk berkembang. Stabilitas politik yang membangun jalan tersebut akan memperoleh legitimasi yang lebih kuat; legitimasi kemudian memperkuat stabilitas. Inilah virtuous cycle yang perlu dibangun Indonesia.

Dengan demikian, tantangan Indonesia kontemporer bukan memilih stabilitas atau demokrasi, pertumbuhan atau pemerataan, negara atau pasar, teknologi atau manusia. Tantangan sebenarnya adalah merancang institusi yang membuat unsur-unsur tersebut saling memperkuat. Stabilitas harus demokratis, pertumbuhan harus produktif, pemerataan harus memberdayakan, negara harus kompeten, pasar harus kompetitif, dan teknologi harus memperluas kemampuan manusia.

Dari perspektif manajemen, ini merupakan persoalan strategic alignment pada skala nasional. Visi, struktur, sumber daya, insentif, data, dan budaya harus diarahkan pada tujuan kemakmuran inklusif. Tanpa alignment, kebijakan sektoral dapat saling meniadakan. Dengan alignment, stabilitas menjadi daya ungkit.

Indonesia tidak kekurangan potensi. Tantangannya adalah mengorganisasikan potensi menjadi kemampuan kolektif. Jika hal itu berhasil, stabilitas politik tidak berhenti sebagai kondisi yang dipertahankan, tetapi menjadi fondasi bagi masyarakat yang semakin produktif, adil, tangguh, dan percaya diri menghadapi masa depan.

49. Pendalaman: Reformasi Pendidikan untuk Ekonomi Berproduktivitas

Tinggi

Pendidikan adalah salah satu mekanisme paling menentukan yang mengubah stabilitas menjadi kemakmuran. Negara yang stabil memperoleh kesempatan menjalankan investasi pendidikan lintas generasi, tetapi hasilnya hanya muncul jika kualitas pembelajaran benar-benar meningkat. Indonesia telah memperluas akses pendidikan secara luas; tantangan berikutnya adalah memastikan setiap jenjang menghasilkan kompetensi yang relevan terhadap kehidupan, kewargaan, dan dunia kerja.

Masalah utama pendidikan bukan sekadar jumlah sekolah, melainkan heterogenitas kualitas. Perbedaan kemampuan membaca, numerasi, sains, dan pemecahan masalah antara sekolah, daerah, dan kelompok sosial dapat memperlebar ketimpangan kesempatan. Karena itu, kebijakan perlu fokus pada learning recovery, kualitas guru, asesmen diagnostik, dukungan siswa, dan kepemimpinan sekolah.

Guru adalah inti sistem. Reformasi guru perlu memperhatikan seleksi, pendidikan awal, mentoring, pengembangan profesional, dan insentif. Pelatihan satu kali sering tidak mengubah praktik kelas. Model yang lebih efektif adalah coaching berkelanjutan, komunitas belajar, observasi, dan penggunaan data pembelajaran.

Teknologi dapat membantu tetapi bukan pengganti pedagogi. Platform digital dan AI dapat menyediakan materi adaptif, tutor virtual, serta analitik pembelajaran. Namun manfaat terbesar muncul ketika guru mampu menggunakan teknologi untuk personalisasi dan feedback. Tanpa itu, teknologi dapat menjadi investasi mahal dengan dampak kecil.

Pendidikan vokasi perlu berhubungan erat dengan industri. Kurikulum harus mengikuti perubahan pekerjaan, sementara perusahaan perlu ikut menyediakan magang dan instruktur. Program yang tidak terhubung pada demand menghasilkan lulusan dengan sertifikat tetapi tanpa peluang.

Perguruan tinggi perlu menyeimbangkan teaching, research, dan engagement. Tidak semua kampus harus menjadi universitas riset, tetapi setiap kampus harus memiliki misi yang jelas. Sebagian fokus pada pendidikan profesional, sebagian pada riset, sebagian pada pengembangan wilayah. Diferensiasi dapat meningkatkan efektivitas.

Keterampilan generasi AI juga perlu didefinisikan ulang. Kemampuan menggunakan alat AI penting, tetapi keterampilan yang lebih tahan lama adalah critical thinking, statistical reasoning, domain knowledge, communication, ethics, and creativity. Semakin kuat AI, semakin penting kemampuan manusia menilai tujuan dan konsekuensi.

Lifelong learning menjadi kebutuhan karena karier tidak lagi linear. Sistem pendidikan perlu menyediakan jalur kembali bagi pekerja dewasa melalui microcredentials, recognition of prior learning, dan kursus modular. Pembiayaan dapat dibagi antara negara, perusahaan, dan individu.

Pendidikan juga memperkuat stabilitas demokratis. Warga yang mampu menilai informasi, memahami perbedaan argumen, dan berpikir kritis lebih tahan terhadap disinformasi. Sekolah dan kampus membentuk kapasitas deliberasi.

Bagi kemakmuran, pendidikan menghasilkan efek yang luas: produktivitas, kesehatan, partisipasi politik, inovasi, dan mobilitas sosial. Karena hasilnya jangka panjang, stabilitas politik seharusnya digunakan untuk melindungi agenda pendidikan dari perubahan kebijakan yang terlalu sering. Tujuan dapat konsisten, sementara metode diperbaiki berdasarkan bukti.

Indonesia perlu memperlakukan learning outcomes sebagai national strategic indicator. Jika produktivitas nasional hendak naik, kualitas pembelajaran harus naik lebih dulu. Investasi pendidikan adalah contoh paling jelas bagaimana stabilitas hari ini dapat diubah menjadi kemakmuran generasi mendatang.

50. Pendalaman: Korporasi, Etika, dan Tanggung Jawab dalam Ekonomi Politik

Kemakmuran tidak hanya dibentuk oleh pemerintah. Perusahaan mempunyai pengaruh besar terhadap kualitas pekerjaan, inovasi, lingkungan, pajak, dan bahkan kebijakan publik. Karena itu, tata kelola korporasi merupakan bagian dari ekonomi politik nasional.

Perusahaan yang dikelola baik mengalokasikan modal secara lebih efisien, mengurangi fraud, dan mengambil keputusan jangka panjang. Board governance, audit, disclosure, dan perlindungan pemegang saham minoritas penting untuk menarik investasi. Namun governance modern juga perlu melihat stakeholder: pekerja, pemasok, konsumen, dan komunitas.

Hubungan bisnis-politik menjadi sensitif ketika perusahaan memperoleh keuntungan melalui akses istimewa. Corporate political activity tidak selalu negatif; perusahaan berhak menyampaikan pandangan kebijakan. Masalah muncul ketika proses tidak transparan atau menghasilkan regulation for privilege. Keterbukaan lobbying dan konflik kepentingan dapat mengurangi risiko capture.

Pajak merupakan bagian tanggung jawab korporasi. Tax planning legal merupakan praktik bisnis, tetapi strategi agresif yang memindahkan keuntungan tanpa aktivitas ekonomi dapat mengikis kontrak sosial. Perusahaan yang menikmati infrastruktur dan pasar memiliki tanggung jawab berkontribusi secara wajar.

Hubungan dengan pekerja juga penting. Produktivitas tidak harus dicapai dengan menekan upah. High-road strategy menggabungkan teknologi, pelatihan, desain kerja, dan partisipasi pekerja. Perusahaan yang membangun keterampilan dapat menghasilkan kualitas lebih tinggi.

ESG berkembang karena investor dan konsumen semakin memperhatikan risiko non-keuangan. Namun ESG dapat menjadi greenwashing jika hanya laporan. Integrasi yang nyata berarti environmental dan social risks masuk dalam strategi, capital allocation, dan performance management.

Supply chain responsibility juga penting. Perusahaan besar dapat meningkatkan standar pemasok melalui kontrak jangka panjang, pelatihan, dan pembiayaan. Ini menjadi saluran upgrading UMKM.

AI memperkenalkan tanggung jawab baru. Perusahaan harus menjaga privasi, bias, keamanan, dan dampak terhadap pekerja. Keputusan otomatis yang memengaruhi konsumen atau karyawan perlu dapat dijelaskan.

Dalam konteks stabilitas, perusahaan memiliki social license. Konflik dengan masyarakat lokal dapat menghentikan operasi dan menimbulkan kerugian besar. Engagement yang dilakukan sejak awal lebih efektif daripada kompensasi setelah konflik.

Kemakmuran yang sehat membutuhkan business class yang melihat keuntungan dan institusi sebagai kepentingan jangka panjang yang selaras. Perusahaan mungkin memperoleh benefit sementara dari aturan lemah, tetapi dalam jangka panjang mereka juga membutuhkan pengadilan, infrastruktur, pendidikan, dan stabilitas. Karena itu, sektor swasta memiliki kepentingan rasional dalam good governance.

Indonesia dapat memperkuat corporate citizenship melalui disclosure, anti-bribery compliance, beneficial ownership transparency, responsible tax practices, dan supplier development. Dengan demikian, perusahaan menjadi bagian dari koalisi kemakmuran, bukan sekadar penerima stabilitas.

51. Pendalaman: Ketahanan Keuangan dan Stabilitas Makro sebagai Prasyarat

Stabilitas politik dapat kehilangan manfaat ekonomi dengan cepat jika terjadi krisis keuangan. Pengalaman Asia 1997-1998 menunjukkan bahwa pelemahan sektor keuangan dapat berubah menjadi krisis sosial dan politik. Karena itu, stabilitas makroprudensial merupakan bagian integral dari perjalanan menuju kemakmuran.

Sistem perbankan perlu sehat, memiliki modal cukup, dan mengelola risiko kredit. Pertumbuhan kredit yang sangat cepat dapat mendorong boom, tetapi juga menghasilkan asset bubbles. Regulasi makroprudensial bertujuan mengurangi procyclicality.

Perkembangan fintech memperluas akses keuangan tetapi menambah risiko baru. Pinjaman digital dapat membantu UMKM dan rumah tangga, namun algoritma kredit, bunga, dan praktik penagihan perlu diawasi. Financial literacy menjadi penting.

Inklusi keuangan tidak cukup diukur dari kepemilikan rekening. Penggunaan produktif, tabungan, asuransi, dan akses kredit berkualitas lebih penting. Banyak rumah tangga masih rentan terhadap shock karena buffer kecil.

Pasar modal dapat membantu membiayai proyek jangka panjang. Pendalaman obligasi, saham, dan dana pensiun mengurangi ketergantungan pada bank. Namun governance perusahaan dan perlindungan investor harus kuat.

Stabilitas nilai tukar juga memengaruhi bisnis yang memiliki utang atau input impor. Fleksibilitas kurs membantu menyerap shock, tetapi volatilitas berlebihan meningkatkan ketidakpastian. Kebijakan moneter kredibel dan cadangan devisa berperan penting.

Koordinasi fiskal dan moneter perlu menjaga kredibilitas tanpa menghilangkan independensi fungsi. Dalam krisis, koordinasi penting; dalam kondisi normal, batas yang jelas menjaga kepercayaan.

Risiko global semakin kompleks karena perubahan suku bunga, geopolitik, dan arus modal. Indonesia perlu mempertahankan buffer dan menghindari mismatch valuta asing yang besar.

Climate risk mulai masuk sektor keuangan. Bank perlu menilai risiko aset yang terkena banjir, transisi karbon, atau kebijakan lingkungan. Stress testing dapat membantu.

AI juga digunakan dalam credit scoring dan fraud detection. Manfaatnya besar, tetapi model dapat bias atau procyclical. Regulasi model risk perlu berkembang.

Stabilitas keuangan sering tidak terlihat ketika berhasil. Justru karena krisis tidak terjadi, masyarakat cenderung menganggapnya otomatis. Padahal regulasi prudensial, pengawasan, dan kredibilitas institusi membutuhkan kerja terus-menerus. Kemakmuran membutuhkan fondasi makro yang tidak rapuh.

52. Pendalaman: Budaya, Modal Sosial, dan Ekonomi Kolaborasi

Pembangunan ekonomi tidak berlangsung dalam ruang hampa institusional. Norma sosial, budaya kerja, kepercayaan, dan pola kolaborasi memengaruhi produktivitas. Modal sosial dapat mengurangi biaya transaksi dan memperkuat collective action.

Indonesia memiliki tradisi gotong royong dalam berbagai bentuk lokal. Nilai ini dapat menjadi aset bagi pembangunan komunitas, koperasi, pengelolaan sumber daya, dan penanggulangan bencana. Namun modal sosial bersifat ambivalen: jaringan yang kuat dapat menjadi eksklusif dan menghasilkan nepotisme jika hanya menguntungkan kelompok sendiri.

Karena itu, pembangunan membutuhkan bridging social capital, yaitu hubungan lintas kelompok. Kota, kampus, organisasi profesi, dan komunitas digital dapat menjadi ruang pertemuan. Semakin luas jaringan, semakin cepat informasi dan inovasi menyebar.

Budaya organisasi juga berpengaruh pada produktivitas. Hierarki yang terlalu kuat dapat menghambat feedback. Pekerja mungkin mengetahui masalah tetapi enggan menyampaikan. Psychological safety meningkatkan pembelajaran.

Pada tingkat nasional, budaya data penting. Keputusan publik seharusnya terbuka terhadap bukti, bukan hanya senioritas atau intuisi. Ini memerlukan statistik independen, riset, dan evaluasi.

Etos meritokrasi juga sentral. Masyarakat akan berinvestasi dalam pendidikan jika percaya kemampuan dihargai. Jika promosi atau peluang lebih ditentukan koneksi, insentif belajar melemah. Meritokrasi tidak berarti mengabaikan ketimpangan awal; justru diperlukan dukungan agar kompetisi kesempatan fair.

Budaya kewirausahaan perlu dikombinasikan dengan etika. Entrepreneurial society yang sehat menghargai inovasi, tetapi menolak shortcut melalui rente. Role model publik memengaruhi norma.

Kepercayaan antarwarga juga membantu ekonomi digital. Marketplace, sharing economy, dan pembayaran online membutuhkan trust mechanisms. Rating, escrow, dan identitas digital adalah cara teknologi meniru modal sosial.

Stabilitas politik yang berlegitimasi dapat memperkuat modal sosial karena warga melihat institusi sebagai fair arena. Sebaliknya, polarisasi yang berkepanjangan dapat merusak bridging ties.

Kemakmuran pada akhirnya merupakan produk kemampuan bekerja sama pada skala besar. Infrastruktur dan modal finansial penting, tetapi proyek nasional tidak berjalan tanpa koordinasi. Modal sosial adalah lem yang membuat institusi formal efektif.

Indonesia dapat memperkuatnya melalui pendidikan kewargaan, transparansi, ruang publik, organisasi komunitas, dan proses kebijakan partisipatif. Ekonomi kolaborasi bukan romantisme; ia adalah strategi mengurangi transaction costs dan meningkatkan resilience.

53. Agenda Implementasi: Dari Rekomendasi ke Sistem Eksekusi

Daftar rekomendasi pembangunan sering panjang, tetapi masalah terbesar adalah eksekusi. Strategi tanpa sistem implementasi mudah menjadi dokumen. Karena itu, agenda kemakmuran perlu diterjemahkan ke governance architecture yang jelas.

Langkah pertama adalah memilih prioritas terbatas. Pemerintah tidak dapat memaksimalkan semua tujuan sekaligus. Beberapa national missions dapat dipilih: produktivitas dan pekerjaan, human capital, transisi energi, ketahanan pangan, digital government, dan kualitas institusi. Setiap misi memiliki indikator dan pemilik tanggung jawab.

Langkah kedua adalah membangun theory of change. Kebijakan harus menjelaskan bagaimana input menghasilkan output dan outcome. Ini membantu mengidentifikasi asumsi yang dapat diuji.

Langkah ketiga adalah data baseline. Tanpa baseline, kemajuan sulit dinilai. Data harus cukup granular untuk melihat perbedaan wilayah dan kelompok.

Langkah keempat adalah delivery unit yang berfungsi sebagai problem-solving team, bukan sekadar pelapor. Unit ini membantu mengatasi bottleneck lintas kementerian dan menggunakan data real-time.

Langkah kelima adalah review berkala. Program besar perlu milestone triwulanan dan evaluasi tahunan. Jika target tidak tercapai, fokus pada diagnosis, bukan hanya blame.

Langkah keenam adalah independent evaluation. Universitas, lembaga riset, auditor, dan masyarakat sipil dapat membantu menilai dampak. Evaluasi independen meningkatkan kredibilitas.

Langkah ketujuh adalah komunikasi publik. Dashboard sederhana memungkinkan masyarakat melihat kemajuan dan memahami trade-off.

Langkah kedelapan adalah adaptive budgeting. Program yang efektif dapat diperluas; yang tidak efektif dikurangi. Anggaran harus mengikuti evidence.

Langkah kesembilan adalah pengembangan talenta implementasi. Policy design membutuhkan kemampuan berbeda dari project delivery. Pemerintah perlu mengembangkan project managers, data analysts, procurement specialists, dan change leaders.

Langkah kesepuluh adalah institutional memory. Pergantian pejabat tidak boleh menghapus pengetahuan. Dokumentasi, knowledge management, dan handover penting.

Pada tingkat daerah, sistem yang sama dapat digunakan dengan indikator lokal. Pemerintah pusat memberi platform dan benchmarking.

Implementasi juga membutuhkan political sponsorship. Reformasi lintas sektor akan menghadapi resistensi. Pemimpin perlu menjaga tujuan sambil memberi ruang teknis.

Dalam manajemen strategis, execution gap sering lebih besar daripada strategy gap. Indonesia memiliki banyak rencana yang baik. Tantangan kontemporer adalah membangun disiplin eksekusi yang menghubungkan stabilitas politik dengan hasil yang dirasakan warga.

Jika sistem implementasi kuat, stabilitas menjadi sumber compounding gains. Setiap tahun kebijakan sedikit lebih baik, data lebih baik, birokrasi lebih mampu, dan trust meningkat. Inilah mekanisme kumulatif yang akhirnya menghasilkan kemakmuran tinggi.

54. Pendalaman: Kepemimpinan Nasional, Strategic Foresight, dan Konsistensi Jangka Panjang

Kepemimpinan nasional berperan penting dalam menjembatani stabilitas politik dan kemakmuran karena banyak keputusan pembangunan mempunyai horizon yang lebih panjang daripada satu siklus politik. Infrastruktur, pendidikan, transisi energi, industrialisasi, dan pembangunan institusi memerlukan kesinambungan arah. Namun kesinambungan tidak berarti menutup ruang perubahan; justru pemimpin perlu membedakan antara tujuan strategis yang perlu stabil dan instrumen yang harus adaptif.

Strategic foresight membantu pemerintah mengantisipasi perubahan sebelum menjadi krisis. Metode seperti horizon scanning, scenario planning, weak-signal analysis, dan stress testing dapat digunakan untuk melihat risiko geopolitik, teknologi, iklim, demografi, dan kesehatan. Foresight bukan meramal masa depan secara pasti. Nilainya terletak pada kesiapan terhadap beberapa kemungkinan.

Pemimpin juga perlu mengelola trade-off yang sulit. Investasi besar dapat mempercepat pertumbuhan tetapi menambah risiko fiskal. Hilirisasi dapat meningkatkan nilai tambah tetapi menimbulkan externality lingkungan. Otomatisasi dapat meningkatkan produktivitas tetapi menekan sebagian pekerjaan. Kepemimpinan yang matang tidak menyederhanakan trade-off; ia menjelaskan pilihan, membangun kompensasi, dan menyiapkan transisi.

Kualitas kabinet dan birokrasi memengaruhi eksekusi. Pemimpin nasional tidak mungkin menguasai semua bidang, sehingga kemampuan memilih tim, memberi mandat, dan menggunakan evidence menjadi penting. Micromanagement dapat memperlambat sistem, sedangkan delegasi tanpa akuntabilitas meningkatkan risiko. Model yang efektif adalah clear goals, empowered teams, transparent metrics.

Konsistensi jangka panjang juga memerlukan institutionalization. Kebijakan yang terlalu melekat pada figur mudah berubah setelah pergantian pemimpin. Karena itu, program strategis perlu didukung undang-undang, peraturan, pembiayaan multi-tahun, sistem data, dan kapasitas organisasi. Institusi mengubah visi personal menjadi aset nasional.

Dalam demokrasi, kepemimpinan juga berarti kemampuan membangun koalisi. Reformasi besar memerlukan dukungan parlemen, daerah, bisnis, pekerja, dan masyarakat. Coalition building bukan tanda kelemahan; ia adalah mekanisme demokratis untuk membuat kebijakan tahan lama. Kebijakan yang hanya bergantung pada satu kelompok mudah dibalik.

Komunikasi pemimpin harus membangun realism with hope. Terlalu optimistis mengurangi kredibilitas ketika masalah muncul; terlalu pesimistis melemahkan kepercayaan. Narasi pembangunan yang baik mengakui kesulitan tetapi menunjukkan jalur tindakan.

Etika kepemimpinan menjadi fondasi. Konflik kepentingan, favoritisme, dan penggunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi merusak trust lebih cepat daripada banyak kegagalan teknis. Integrity signal dari atas memengaruhi budaya organisasi di bawah.

Bagi Indonesia, kepemimpinan masa depan perlu menggabungkan tiga kemampuan: strategic imagination untuk melihat kemungkinan baru, institutional discipline untuk menjalankan kebijakan, dan democratic legitimacy untuk mempertahankan dukungan. Ketiganya saling melengkapi.

Jika kepemimpinan mampu memanfaatkan periode stabil untuk melakukan reformasi sulit sebelum tekanan muncul, Indonesia memperoleh first-mover advantage. Sebaliknya, jika stabilitas digunakan hanya untuk mempertahankan status quo, peluang demographic dan technological window dapat tertutup. Dengan demikian, stabilitas politik sebenarnya adalah waktu yang harus diinvestasikan. Kepemimpinan menentukan apakah waktu itu menghasilkan compounding progress atau opportunity cost.

55. Pendalaman: Etika Pemerataan Antargenerasi

Kemakmuran tidak hanya mempunyai dimensi antar-kelompok pada masa kini, tetapi juga antargenerasi. Kebijakan hari ini menentukan beban utang, kualitas lingkungan, stok infrastruktur, pendidikan, dan peluang ekonomi yang diwarisi generasi berikutnya. Karena itu, pembangunan perlu menggunakan prinsip intergenerational equity.

Utang publik memberikan contoh sederhana. Utang dapat adil antargenerasi jika digunakan membangun aset yang juga dinikmati generasi mendatang. Namun utang yang membiayai konsumsi tanpa meningkatkan kapasitas dapat memindahkan beban. Prinsip yang sama berlaku pada sumber daya alam. Ekstraksi hari ini dapat meningkatkan pendapatan, tetapi sebagian keuntungan sebaiknya diubah menjadi human capital, infrastruktur, atau sovereign assets agar kekayaan tidak habis bersama sumber daya.

Perubahan iklim memperjelas isu ini. Emisi hari ini menghasilkan biaya yang sebagian besar dirasakan nanti. Generasi muda dan yang belum lahir tidak memiliki suara langsung dalam keputusan sekarang. Karena itu, institusi perlu memasukkan long-term impact assessment.

Pendidikan merupakan investasi antargenerasi yang paling nyata. Ketika kualitas pendidikan meningkat, manfaatnya muncul puluhan tahun. Sebaliknya, learning loss hari ini dapat mengurangi produktivitas seumur hidup. Karena itu, anggaran pendidikan seharusnya dilindungi dari pendekatan jangka pendek.

Perencanaan kota juga bersifat antargenerasi. Tata ruang yang buruk menciptakan lock-in selama puluhan tahun. Kota yang dibangun untuk kendaraan pribadi sulit diubah menjadi walkable city. Keputusan infrastruktur harus mempertimbangkan legacy.

Teknologi juga membawa pertanyaan etis. AI dapat meningkatkan produktivitas, tetapi keputusan tentang data, privasi, dan otomatisasi membentuk norma masa depan. Generasi berikutnya akan hidup dalam sistem yang dibangun sekarang.

Intergenerational equity tidak berarti mengorbankan kebutuhan hari ini. Kemiskinan saat ini juga mendesak. Tantangan adalah mencari kebijakan yang menghasilkan double dividend: mengurangi kemiskinan sekaligus memperkuat masa depan. Nutrisi anak, energi bersih, transportasi publik, restorasi ekosistem, dan pendidikan adalah contoh.

Indonesia mempunyai bonus demografi yang bersifat sementara. Jika generasi muda hari ini memperoleh pekerjaan bermutu dan produktif, mereka akan membangun basis pajak untuk menghadapi aging population di masa depan. Jika tidak, opportunity window hilang.

Stabilitas politik memberikan ruang untuk berpikir lintas generasi karena negara tidak selalu berada dalam mode krisis. Pemerintah dapat membuat fiscal rules, climate commitments, education targets, dan infrastructure plans yang melampaui periode jabatan.

Budaya politik juga perlu menghargai stewardship: pemimpin sebagai pengelola amanah, bukan pemilik sumber daya. Perspektif ini memperkuat tanggung jawab terhadap masa depan.

Kemakmuran sejati adalah kemampuan satu generasi memperbaiki kondisi hidup tanpa mengurangi kesempatan generasi berikutnya. Dalam kerangka tersebut, stabilitas politik adalah amanah temporal: kesempatan yang harus digunakan untuk meninggalkan institusi, manusia, dan lingkungan dalam keadaan lebih kuat.

56. Epilog: Indonesia sebagai Proyek Pembelajaran Kolektif

Indonesia adalah negara yang terlalu besar dan beragam untuk dikelola melalui satu formula sederhana. Pembangunan selalu merupakan proses pembelajaran kolektif. Pemerintah belajar dari implementasi, perusahaan belajar dari pasar, masyarakat belajar dari pengalaman, dan institusi belajar dari kesalahan. Kemakmuran muncul ketika sistem mampu mempercepat pembelajaran tersebut.

Stabilitas politik memberi kondisi penting bagi pembelajaran karena organisasi membutuhkan continuity. Tetapi continuity tanpa feedback menghasilkan rutinitas. Oleh karena itu, stabilitas harus dipadukan dengan evaluasi dan keterbukaan. Sistem yang sehat tidak malu memperbaiki kebijakan; justru kemampuan mengakui kesalahan adalah tanda kapasitas.

Indonesia telah berulang kali menunjukkan kemampuan beradaptasi: dari krisis 1998 ke demokrasi, dari sentralisasi ke desentralisasi, dari ekonomi berbasis komoditas menuju diversifikasi, dan dari administrasi manual menuju digital. Setiap transisi tidak sempurna, tetapi menunjukkan institutional plasticity.

Era berikutnya mungkin lebih menantang. AI mengubah pekerjaan dengan cepat, iklim meningkatkan risiko, geopolitik memecah rantai pasok, dan masyarakat digital menuntut respons instan. Negara tidak dapat mengandalkan policy playbook lama. Ia harus menjadi learning state.

Learning state mempunyai beberapa ciri. Data dikumpulkan untuk keputusan, bukan hanya laporan. Pilot digunakan sebelum scale-up. Evaluasi independen diterima. Pejabat teknis dihargai. Kebijakan yang gagal dapat dihentikan tanpa dianggap kehilangan muka. Masyarakat dilibatkan sebagai sumber informasi.

Dunia usaha juga harus menjadi learning organizations. Perusahaan yang berhasil bukan yang selalu benar, tetapi yang cepat mendeteksi perubahan dan memperbaiki model bisnis. AI mempercepat siklus ini. Manajemen Indonesia perlu membangun budaya eksperimen dan pengembangan talenta.

Perguruan tinggi mempunyai peran khusus sebagai memory dan imagination institutions. Kampus menyimpan pengetahuan, mengkritik kebijakan, melatih generasi, dan membayangkan alternatif. Hubungan kampus dengan pemerintah dan bisnis harus kuat tetapi menjaga independensi akademik.

Masyarakat sipil dan media membantu menjaga feedback loop. Mereka mengangkat pengalaman yang tidak terlihat di dashboard. Kritik yang berbasis bukti adalah input bagi pembelajaran nasional.

Dalam perspektif ini, konflik bukan selalu kegagalan. Konflik dapat menunjukkan adanya masalah distribusi atau representasi. Tugas institusi adalah mengubah konflik menjadi informasi dan negosiasi. Stabilitas bukan menghapus konflik, tetapi mengelolanya tanpa kekerasan dan tanpa menghancurkan kepercayaan.

Kemakmuran juga bukan keadaan final. Ketika pendapatan naik, aspirasi berubah. Masyarakat kemudian menuntut kualitas udara, ruang publik, fairness, waktu luang, privasi, dan meaningful work. Pemerintah harus terus memperbarui definisi kesejahteraan.

Indonesia memiliki peluang besar karena jumlah penduduk, sumber daya, budaya, dan posisi strategis. Tetapi potensi tidak menghasilkan hasil tanpa institusi. Negara perlu mengubah potensi menjadi capability, capability menjadi productivity, dan productivity menjadi shared prosperity.

Pesan akhir artikel ini adalah bahwa stabilitas politik seharusnya dilihat sebagai energi potensial. Ia belum menjadi kemakmuran sampai dikonversi melalui rule of law, birokrasi profesional, investasi berkualitas, pendidikan, inovasi, pemerataan, dan trust. Konversi tersebut adalah pekerjaan manajemen nasional.

Jika Indonesia berhasil membangun siklus di mana stabilitas memperkuat institusi, institusi mempercepat pembelajaran, pembelajaran meningkatkan produktivitas, dan produktivitas memperluas kemakmuran, maka legitimasi akan tumbuh dan stabilitas semakin kuat. Siklus ini tidak otomatis, tetapi dapat dirancang.

Dengan demikian, masa depan Indonesia tidak semata ditentukan oleh apakah politik stabil atau ekonomi tumbuh. Masa depan ditentukan oleh kemampuan kolektif menghubungkan keduanya secara etis, produktif, adaptif, dan inklusif. Itulah tantangan Indonesia kontemporer sekaligus peluang terbesar untuk generasi yang akan datang.

Kotak-Kotak Kebijakan Strategis

Kotak Kebijakan 1. Sepuluh Indikator Prosperity Dashboard

Untuk mencegah fokus berlebihan pada PDB, pemerintah dapat menggunakan prosperity dashboard yang memuat sepuluh kelompok indikator. Pertama, pertumbuhan PDB per kapita riil. Kedua, produktivitas tenaga kerja dan total factor productivity. Ketiga, median real wage dan distribusi upah. Keempat, kualitas pekerjaan: formalitas, setengah pengangguran, keamanan kerja, dan pelatihan. Kelima, learning outcomes dan keterampilan. Keenam, mobilitas sosial dan kemiskinan multidimensi. Ketujuh, kualitas layanan publik. Kedelapan, trust dan kualitas institusi. Kesembilan, natural capital dan emisi. Kesepuluh, disparitas regional. Dashboard harus dipublikasikan secara rutin agar masyarakat dapat melihat apakah pertumbuhan benar-benar berubah menjadi kemakmuran.

Kotak Kebijakan 2. Prinsip Reformasi Regulasi

Reformasi regulasi yang sehat dapat mengikuti enam prinsip. Pertama, necessity: aturan dibuat hanya bila ada masalah publik yang jelas. Kedua, proportionality: beban aturan sebanding dengan risiko. Ketiga, consistency: aturan tidak saling bertentangan. Keempat, predictability: perubahan diberi masa transisi. Kelima, transparency: dasar data dan tujuan dijelaskan. Keenam, reviewability: aturan dapat dievaluasi dan dicabut bila tidak efektif. Setiap regulasi besar sebaiknya memiliki regulatory impact assessment dan sunset review. Dengan prinsip tersebut, deregulasi tidak berarti menghilangkan perlindungan, melainkan meningkatkan kualitas aturan.

Kotak Kebijakan 3. Dari Hilirisasi ke Deep Industrialization

Deep industrialization memerlukan lima lapisan. Lapisan pertama adalah pengolahan dasar. Kedua, komponen dan produk lanjutan. Ketiga, supplier ecosystem domestik. Keempat, engineering, design, dan R&D. Kelima, brand, distribution, dan intellectual property. Hilirisasi yang berhenti di lapisan pertama memberi nilai tambah tetapi terbatas. Kebijakan perlu mendorong pergerakan ke lapisan lebih tinggi melalui supplier development, pendidikan teknik, laboratorium, standardisasi, dan insentif berbasis kinerja. Tujuannya bukan sekadar membuat barang di Indonesia, tetapi meningkatkan kemampuan Indonesia membuat teknologi dan keputusan bernilai tinggi.

Kotak Kebijakan 4. AI untuk Pemerintahan yang Lebih Baik

Penggunaan AI sektor publik sebaiknya diprioritaskan pada use case yang jelas: deteksi anomali pengadaan, triase dokumen, layanan tanya-jawab, peramalan kebutuhan, maintenance prediktif, dan analitik program. Sistem berisiko tinggi seperti penentuan hak bantuan, penegakan hukum, atau keputusan personal harus memiliki human oversight, audit bias, dokumentasi model, dan jalur banding. Prinsipnya adalah augment public servants, bukan menghapus akuntabilitas manusia. Pemerintah juga perlu menghindari vendor lock-in melalui standar terbuka dan portabilitas data.

Kotak Kebijakan 5. Lima Pilar Stabilitas Berlegitimasi

Stabilitas berlegitimasi dapat dibangun melalui lima pilar. Pertama, rule of law yang berlaku setara. Kedua, kompetisi politik yang damai dan kredibel. Ketiga, birokrasi profesional yang menjaga kontinuitas negara. Keempat, ruang publik yang memungkinkan kritik dan koreksi. Kelima, layanan publik yang memberikan bukti nyata bahwa negara bekerja. Jika kelima pilar kuat, konflik tidak harus dihilangkan; konflik dapat diproses secara institusional. Inilah stabilitas yang adaptif dan kompatibel dengan demokrasi.

Kotak Kebijakan 6. Agenda 1000 Hari untuk Produktivitas

Agenda produktivitas dapat dimulai dengan program 1000 hari: menyederhanakan regulasi prioritas, mempercepat interoperabilitas data pemerintah, memperluas pelatihan AI untuk UMKM dan pekerja, memperkuat supplier development di kawasan industri, meningkatkan maintenance infrastruktur, mengintegrasikan program vokasi dengan perusahaan, memperbaiki logistik pangan, memperluas digital procurement analytics, serta membangun productivity dashboard nasional. Program perlu memiliki target kuantitatif dan evaluasi independen. Keberhasilan diukur dari penurunan biaya, peningkatan output, dan naiknya pendapatan, bukan jumlah kegiatan.

Studi Kasus dan Ilustrasi Analitis

Kasus A. Hilirisasi Nikel: Pertumbuhan, Kapabilitas, dan Lingkungan

Hilirisasi nikel menggambarkan kompleksitas hubungan stabilitas, investasi, dan kemakmuran. Indonesia memiliki posisi penting dalam pasokan nikel global dan menggunakan kebijakan industri untuk mendorong pengolahan domestik. Strategi ini meningkatkan investasi dan menempatkan Indonesia dalam ekosistem material baterai. Dari sudut stabilitas, konsistensi arah kebijakan memberi sinyal kuat pada investor bahwa pemerintah serius membangun industri hilir.

Namun keberhasilan tidak boleh berhenti pada kapasitas smelter. Nilai pembangunan yang lebih besar muncul jika industri membentuk jaringan pemasok lokal, meningkatkan keterampilan teknik, memperluas penelitian metalurgi, meningkatkan kandungan jasa domestik, dan bergerak ke produk bernilai lebih tinggi. Jika sebagian besar high-value activities tetap berada di luar negeri, Indonesia memperoleh keuntungan tetapi belum sepenuhnya mengubah struktur kemampuan.

Aspek lingkungan menentukan legitimasi. Pertambangan dan pengolahan berintensitas energi dapat menciptakan konflik lahan, pencemaran, dan emisi. Jika masyarakat lokal menanggung externalities sementara manfaat finansial terkonsentrasi, stabilitas sosial dapat terganggu. Karena itu, industrial policy perlu disandingkan dengan environmental governance, transparansi, dan community benefit sharing.

Kasus nikel menunjukkan bahwa stabilitas kebijakan dapat menarik modal, tetapi prosperity dividend ditentukan oleh kualitas linkage dan governance. Ukuran keberhasilan yang lebih lengkap mencakup produktivitas, pendapatan daerah, kualitas pekerjaan, emisi per unit output, kandungan teknologi, dan jumlah pemasok nasional yang naik kelas.

Kasus B. Digitalisasi Pemerintahan: Dari Administrasi ke Negara Berbasis Data

Digital government sering dipahami sebagai memindahkan formulir kertas ke aplikasi. Pendekatan ini terlalu sempit. Transformasi digital negara seharusnya mengubah architecture of public administration: data terintegrasi, identitas konsisten, proses end-to-end, interoperabilitas, dan analitik untuk keputusan.

Ketika data kependudukan, perpajakan, usaha, bantuan sosial, kesehatan, dan pendidikan dapat saling berkomunikasi dengan perlindungan yang memadai, pemerintah dapat mengurangi duplikasi dan targeting error. Pelaku usaha menghemat waktu karena tidak perlu menyerahkan informasi yang sama berkali-kali. Masyarakat menerima layanan yang lebih cepat.

Namun konsentrasi data juga membawa risiko. Kebocoran, penyalahgunaan, atau profiling dapat mengikis kepercayaan. Karena itu digital public infrastructure memerlukan governance: purpose limitation, access control, logging, audit, cybersecurity, dan mekanisme koreksi data. Dalam penggunaan AI, diperlukan human oversight dan penjelasan pada keputusan yang berdampak besar.

Kasus ini memperlihatkan bahwa teknologi dapat memperkuat kapasitas negara, tetapi legitimacy by design sama pentingnya dengan efficiency by design. Negara digital yang efisien tetapi tidak dipercaya akan menghadapi resistensi. Negara digital yang terpercaya dapat menurunkan transaction costs secara luas dan menjadi platform kemakmuran.

Kasus C. IKN dan Pembangunan Spasial

Pembangunan Ibu Kota Nusantara merupakan contoh kebijakan dengan horizon jangka panjang. Secara ekonomi politik, proyek ini berkaitan dengan redistribusi spasial aktivitas pemerintahan dan visi

pengembangan wilayah di luar Jawa. Proyek besar seperti ini menguji kemampuan negara menjaga konsistensi lintas pemerintahan sekaligus melakukan evaluasi adaptif.

Keberhasilan tidak hanya dinilai dari gedung yang selesai. Pertanyaan strategis adalah apakah IKN menciptakan aglomerasi produktif, menarik talenta, membangun konektivitas dengan ekonomi Kalimantan, mendorong inovasi hijau, dan memiliki model fiskal berkelanjutan. Jika hanya menjadi enclave administratif, multiplier effect dapat terbatas.

Aspek sosial dan lingkungan juga sentral. Tata ruang, hak masyarakat lokal, ekosistem, air, transportasi, dan perumahan perlu dikelola. Transparansi investasi dan procurement penting karena skala proyek besar.

IKN menunjukkan bahwa stabilitas politik dapat memungkinkan proyek multi-dekade, tetapi proyek jangka panjang memerlukan institutional continuity, bukan hanya political continuity. Institusi harus mampu mempertahankan tujuan sambil menyesuaikan desain ketika data menunjukkan kebutuhan perubahan.

Kasus D. UMKM dan AI: Demokratisasi Produktivitas atau Kesenjangan Baru

AI generatif dapat membantu UMKM membuat materi pemasaran, menerjemahkan bahasa, menganalisis pelanggan, menyusun proposal, mendesain produk, dan mengotomatisasi layanan. Biaya teknologi menurun sehingga sebagian kemampuan yang dahulu hanya tersedia bagi perusahaan besar menjadi lebih terjangkau.

Namun adopsi tidak otomatis. UMKM membutuhkan data yang rapi, koneksi internet, perangkat, literasi, proses bisnis, dan akses modal. Tanpa itu, AI hanya menjadi alat sporadis. Pemerintah dan platform dapat membangun program adoption yang berbasis use case, bukan pelatihan abstrak.

Ada pula risiko ketergantungan pada platform asing, keamanan data, dan homogenisasi konten. Karena itu digital capability perlu mencakup cybersecurity, data governance, dan kemampuan mengevaluasi output AI.

Jika dirancang baik, AI dapat menjadi productivity equalizer. Jika tidak, perusahaan besar bergerak lebih cepat dan productivity gap melebar. Kebijakan teknologi karena itu harus dilihat sebagai kebijakan distribusi kemampuan.

Kasus E. Stabilitas Harga Pangan dan Legitimasi

Harga pangan memiliki bobot politik yang besar karena menyentuh kehidupan sehari-hari. Inflasi agregat mungkin berada dalam sasaran, tetapi kenaikan harga beras, cabai, minyak goreng, atau telur segera dirasakan. Karena itu food-price stability merupakan bagian dari social stability.

Kebijakan jangka pendek seperti operasi pasar dapat meredakan shock, tetapi solusi struktural memerlukan produktivitas pertanian, irigasi, logistik, cold chain, informasi pasar, dan pengurangan kehilangan pascapanen. Import policy perlu berbasis data dan waktu yang tepat agar tidak merusak insentif petani.

Keseimbangan produsen-konsumen adalah dilema klasik. Harga terlalu rendah merugikan petani; terlalu tinggi merugikan konsumen. Solusinya bukan memilih salah satu, tetapi meningkatkan produktivitas sehingga pendapatan petani naik tanpa mendorong harga konsumen secara berlebihan.

Kasus pangan mengajarkan bahwa stabilitas yang terlihat di statistik makro harus diterjemahkan ke tingkat rumah tangga. Legitimasi ekonomi sering ditentukan oleh harga kebutuhan dasar lebih daripada angka pertumbuhan PDB.

Matriks Konversi Stabilitas menjadi Kemakmuran

Modal Awal	Mekanisme Konversi	Risiko Jika Lemah	Indikator Hasil
Stabilitas politik	Kredibilitas kebijakan dan penyelesaian konflik	Ketidakpastian, premi risiko	Investasi jangka panjang
Rule of law	Penegakan kontrak dan hak	Rente, biaya transaksi	Kompetisi dan formalitas
Kapasitas negara	Implementasi dan koordinasi	Program tidak efektif	Kualitas layanan publik
Human capital	Keterampilan dan inovasi	Produktivitas rendah	Upah riil dan mobilitas
Infrastruktur	Konektivitas fisik/digital	Biaya logistik	Integrasi pasar
Perlindungan sosial	Manajemen risiko rumah tangga	Backlash reformasi	Resiliensi sosial
Demokrasi dan akuntabilitas	Feedback dan koreksi kebijakan	Policy capture	Trust dan legitimasi
Transformasi digital/AI	Otomatisasi dan augmentation	Kesenjangan kemampuan	Produktivitas dan kualitas kerja

Glossarium

Aglomerasi: Konsentrasi aktivitas ekonomi di suatu wilayah yang menghasilkan keuntungan skala, jaringan pemasok, dan pasar tenaga kerja yang lebih dalam.

AI governance: Kerangka aturan, tanggung jawab, audit, dan pengawasan untuk memastikan penggunaan kecerdasan artifisial aman, adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Beneficial ownership: Identitas individu yang pada akhirnya memiliki atau mengendalikan suatu badan usaha atau aset.

Capability: Kemampuan yang terakumulasi pada individu, perusahaan, institusi, atau negara untuk melakukan aktivitas produktif secara efektif.

Credible commitment: Komitmen kebijakan yang dipercaya pelaku ekonomi karena didukung institusi dan mekanisme yang membuat perubahan oportunistik menjadi mahal.

Digital public infrastructure: Infrastruktur digital bersama seperti identitas, pembayaran, dan pertukaran data yang memungkinkan berbagai layanan publik dan privat dibangun di atasnya.

Economic complexity: Tingkat keragaman dan kecanggihan pengetahuan produktif yang tercermin dalam barang dan jasa yang mampu dihasilkan suatu ekonomi.

Externality: Dampak kegiatan ekonomi pada pihak lain yang tidak sepenuhnya tercermin dalam harga pasar, misalnya polusi.

Flexicurity: Kombinasi fleksibilitas pasar kerja dengan perlindungan dan keamanan transisi bagi pekerja.

Governance: Cara kekuasaan dan sumber daya dikelola melalui institusi, aturan, proses keputusan, transparansi, dan pertanggungjawaban.

Hilirisasi: Strategi meningkatkan pengolahan dan nilai tambah sumber daya di dalam negeri sebelum dijual sebagai produk akhir atau input industri lanjutan.

Human capital: Pengetahuan, keterampilan, kesehatan, dan kapasitas manusia yang meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan.

Inklusi ekonomi: Kondisi ketika kelompok dan wilayah yang luas memiliki akses nyata terhadap pekerjaan, pasar, pembiayaan, layanan, dan peluang mobilitas.

Institutional quality: Kualitas aturan dan organisasi yang menentukan kepastian, akuntabilitas, efektivitas pemerintah, rule of law, dan pengendalian korupsi.

Middle-class anxiety: Kecemasan kelas menengah ketika pendapatan, keamanan kerja, dan mobilitas sosial tidak mampu mengejar biaya hidup dan aspirasi.

Policy credibility: Tingkat kepercayaan bahwa kebijakan konsisten, dapat dilaksanakan, dan tidak mudah berubah secara oportunistik.

Productivity: Kemampuan menghasilkan output atau nilai tambah dari sejumlah input tertentu.

Prosperity dividend: Manfaat kesejahteraan yang muncul ketika stabilitas dan institusi diterjemahkan menjadi investasi, produktivitas, serta pendapatan yang lebih tinggi.

Rent-seeking: Upaya memperoleh keuntungan melalui privilege, regulasi, atau kedekatan politik, bukan melalui peningkatan produktivitas.

Resilience: Kemampuan sistem menyerap gangguan, beradaptasi, dan pulih tanpa kehilangan fungsi utama.

Rule of law: Prinsip bahwa hukum berlaku konsisten, dapat diprediksi, dan mengikat warga maupun pemegang kekuasaan.

Stability trap: Situasi ketika stabilitas politik dipertahankan tetapi reformasi produktivitas dan institusi yang dibutuhkan tertunda.

Total factor productivity: Ukuran efisiensi gabungan penggunaan modal dan tenaga kerja yang menangkap kontribusi teknologi, organisasi, dan institusi.

Trust: Keyakinan bahwa institusi atau pihak lain akan bertindak secara kompeten, konsisten, dan cukup dapat diprediksi.

Virtuous cycle: Siklus umpan balik positif ketika perbaikan pada satu unsur memperkuat unsur lain, misalnya kemakmuran meningkatkan legitimasi dan legitimasi mendukung reformasi.

Daftar Pustaka

Format APA 7. DOI dicantumkan apabila tersedia.

- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty*. Crown.
- Acemoglu, D., Naidu, S., Restrepo, P., & Robinson, J. A. (2019). Democracy does cause growth. *Journal of Political Economy*, 127(1), 47–100. <https://doi.org/10.1086/700936>
- Alesina, A., & Perotti, R. (1996). Income distribution, political instability, and investment. *European Economic Review*, 40(6), 1203–1228. [https://doi.org/10.1016/0014-2921\(95\)00030-5](https://doi.org/10.1016/0014-2921(95)00030-5)
- Badan Pusat Statistik. (2026a, May 5). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,68 persen; rata-rata upah buruh sebesar 3,29 juta rupiah.
- Badan Pusat Statistik. (2026b, August 3). Inflasi year-on-year pada Juli 2026 sebesar 2,88 persen.
- Badan Pusat Statistik. (2026c, August 5). Ekonomi Indonesia Triwulan II-2026 tumbuh 5,29 persen (y-on-y).
- Barro, R. J. (1996). Democracy and growth. *Journal of Economic Growth*, 1, 1–27. <https://doi.org/10.1007/BF00138861>
- Besley, T., & Persson, T. (2011). *Pillars of prosperity: The political economics of development clusters*. Princeton University Press.
- Fukuyama, F. (2013). What is governance? *Governance*, 26(3), 347–368. <https://doi.org/10.1111/gove.12035>
- Freedom House. (2026). *Freedom in the World 2026: Indonesia*. Freedom House.
- Hall, R. E., & Jones, C. I. (1999). Why do some countries produce so much more output per worker than others? *Quarterly Journal of Economics*, 114(1), 83–116. <https://doi.org/10.1162/003355399555954>
- Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. (2026, July 17). Realisasi investasi Semester I 2026 tembus Rp1.010,6 triliun, serap 1,4 juta tenaga kerja langsung.
- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511808678>
- Olson, M. (1993). Dictatorship, democracy, and development. *American Political Science Review*, 87(3), 567–576. <https://doi.org/10.2307/2938736>
- Rodrik, D. (2000). Institutions for high-quality growth: What they are and how to acquire them. *Studies in Comparative International Development*, 35, 3–31. <https://doi.org/10.1007/BF02699764>
- Rodrik, D., Subramanian, A., & Trebbi, F. (2004). Institutions rule: The primacy of institutions over geography and integration in economic development. *Journal of Economic Growth*, 9, 131–165. <https://doi.org/10.1023/B:JOEG.0000031425.72248.85>
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Stiglitz, J. E. (1998). *Towards a new paradigm for development: Strategies, policies, and processes*. UNCTAD.
- World Bank. (2017). *World Development Report 2017: Governance and the law*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0950-7>

World Bank. (2024). Indonesia economic prospects: Policy directions for resilient and inclusive growth. World Bank.

World Bank. (2025). Indonesia country economic memorandum and related development updates. World Bank.

Sumber Data Kontemporer Utama

BPS - Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II-2026:

<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/08/05/2605/ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2026-tumbuh-5-29-persen--y-on-y-.html>

BPS - Inflasi Juli 2026: <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/08/03/2601/inflasi-year-on-year--y-on-y--pada-juli-2026-sebesar-2-88-persen-.html>

BPS - Ketenagakerjaan Februari 2026:

<https://www.bps.go.id/assets/pressrelease/2026/05/05/2574/tingkat-pengangguran-terbuka>

BKPM - Realisasi Investasi Semester I 2026: <https://bkpm.go.id/id/info/siaran-pers/realisasi-investasi-semester-i-2026-tembus-rp-1-010-t-serap-1-4-juta-tenaga-kerja-langsung>

Freedom House - Indonesia 2026: <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2026>